

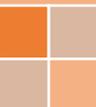


**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN**

# **RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2023-2026**



**RENSTRA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menyelesaikan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023-2026.

Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023-2026 ini disusun untuk sebagai gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 4 tahun ke depan serta perubahan dari Renstra sebelumnya yang telah kami susun.

Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023-2026 ini sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusun kebijakan sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Singkawang.

Kami berharap Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi penataan organisasi, dan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Singkawang, Mei 2023

KEPALA DINAS,



**Ir. H. ASYIR A. BAKAR, MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631010 199203 1 018



# DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN
  - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
  - 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
  - 3.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi KaL-Bar
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Singkawang
  - 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

Lampiran



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 sehingga seluruh Kepala Perangkat Daerah di instruksikan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam perumusan kebijakan teknis pengawasan serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang menyusun



dokumen perencanaan strategis 4 (empat) tahunan periode 2023-2026, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun, sebagai sinkronisasi, sinergisitas dan penyelarasan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana yang ditetapkan di dalam RPD Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Kota Singkawang.

Penyusunan rancangan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilaksanakan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPD, dimana Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang meliputi 6 (enam) tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

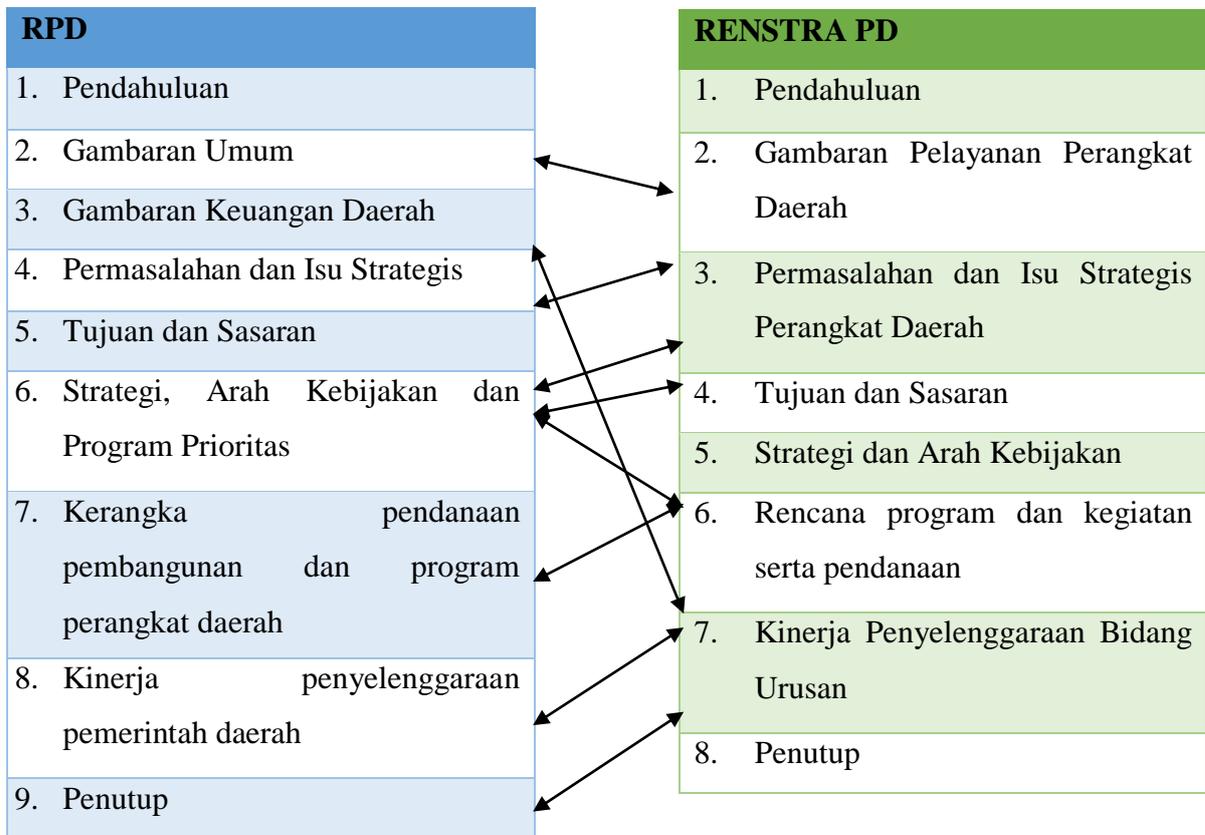
Dalam tahapannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, pendanaan, target dan indikator kinerjanya telah selaras dengan tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang.

Keterkaitan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

**Keterkaitan Substansi RPD dengan Renstra Perangkat Daerah**



Keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Singkawang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Sehingga akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dengan dokumen perencanaan lainnya adalah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian yang utuh dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian pencapaian Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang juga diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan

nasional yaitu :

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
  - (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
  - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
  - (3) Kapasitas tampung per kapita;
  - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan indikator kinerja:
  - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
  - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
  - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
  - (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
  - (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
  - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
  - (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
  - (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
  - (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;



(6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi

**1.2 Landasan Hukum**

Dasar Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5);
19. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 600.1.7.2/113/PUPR.BMJK Tahun 2023 tentang Penetapan Status Jalan Kota Singkawang;



## 1.3 Maksud dan Tujuan

### 1.3.2 Maksud

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ditetapkan untuk menyesuaikan target dan memberikan arahan acuan didalam mewujudkan tujuan sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah, sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis dan saling melengkapi satu sama lainnya.

### 1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023-2026, adalah:

1. Merumuskan penyesuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Singkawang untuk kurun waktu Tahun 2023-2026, yang terkait dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah 4 (empat) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dalam menyusun program dan kegiatan periode 2023-2026;
2. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Singkawang yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2023-2026;
3. Merumuskan penyesuaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dan indikator kinerja kepala daerah, sebagai dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023-2026;
4. Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah sebagaimana yang ditetapkan di dalam RPD Kota Singkawang 2023-2026 sesuai dengan bidang urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Singkawang;
5. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan untuk kurun waktu Tahun 2023-2026;
6. Alat ukur dalam evaluasi kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Singkawang.
7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, berkeadilan dan berkelanjutan.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dengan RPD, Renstra provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renstra Kementerian PUPR.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Memuat penjelasan umum tentang**



dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang (proses, prosedur, mekanisme).

## 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang berdasarkan sasaran/target Renstra I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.



### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian ini mengemukakan factor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang;
2. sasaran jangka menengah Kementerian PUPR



3. sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas PUPR Kota Singkawang; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas PUPR Kota Singkawang.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Berisi tentang penutup Renstra



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang Tanggal 24 Oktober 2016 serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 107 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang tanggal 2 Desember 2021, sebagai berikut :

**a. Tugas Pokok**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang mempunyai fungsi:

1. Perumusan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
5. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan serta pembinaan cipta karya dan persampahan;



6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
7. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Siste Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas;
8. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dipimpin oleh Kepala Dinas dengan struktur organisasi yang diatur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri atas :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Substansi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja; dan
  - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Sumber Daya Air terdiri atas :
  - a. Sub Substansi Sumber Daya Air, Bangunan Sungai dan Pantai;
  - b. Sub Substansi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi; dan
  - c. Sub Substansi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
4. Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi terdiri atas :
  - a. Sub Substansi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  - b. Sub Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
  - c. Sub Substansi Pengembangan Jasa Konstruksi.
5. Bidang Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan terdiri atas:
  - a. Sub Substansi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
  - b. Sub Substansi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. Sub Substansi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
6. Bidang Cipta Karya dan Persampahan terdiri atas :
  - a. Sub Substansi Pengembangan Permukiman;
  - b. Sub Substansi Penataan Bangunan dan Gedung; dan



c. Sub Substansi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Air Limbah dan Persampahan.

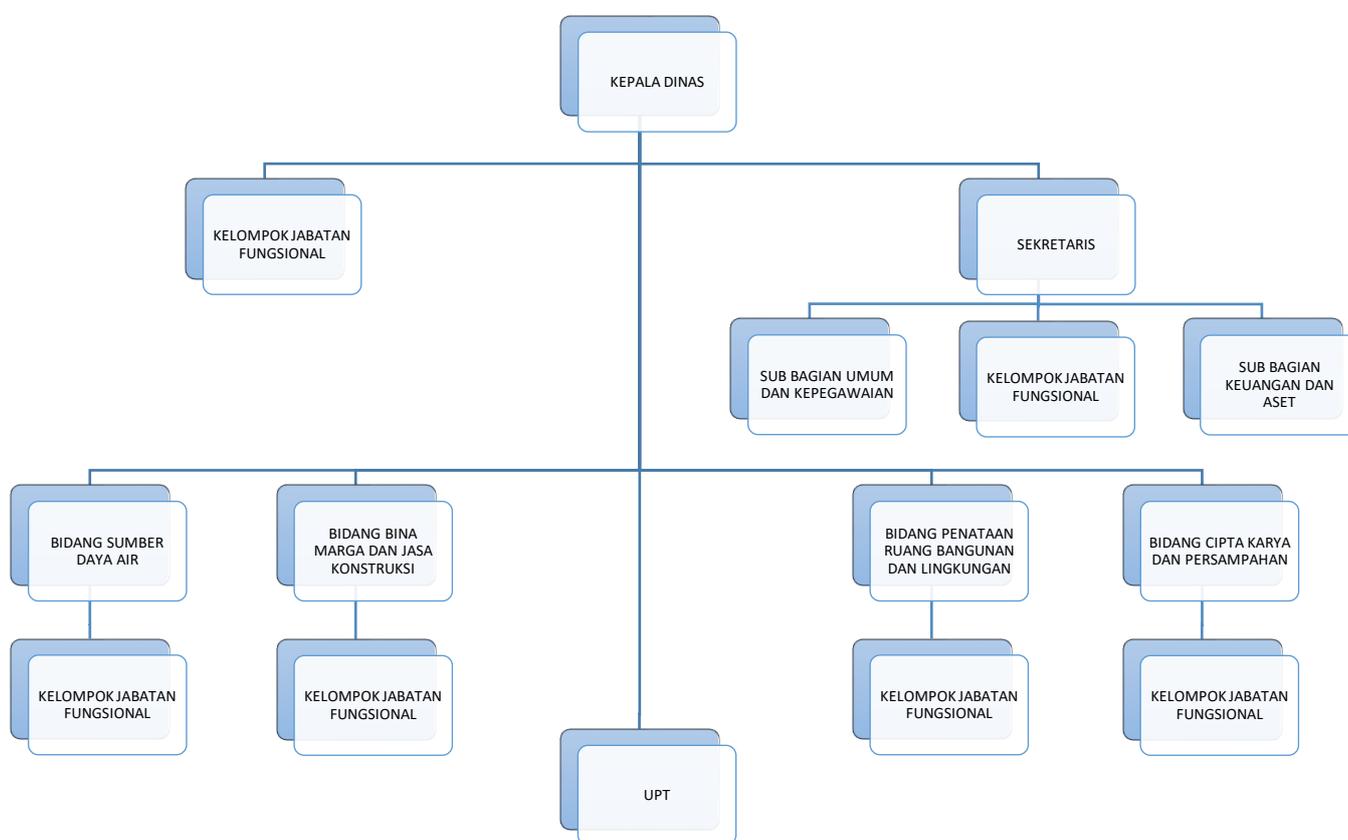
7. UPT; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi

### STRUKTUR ORGANISASI



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Singkawang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, sesuai peraturan per Undang-Undang yang berlaku.

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang



pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penetapan sasaran strategis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. penetapan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan, serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana berikut:

1. Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretaris menjalankan fungsi antara lain:

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;



- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretaris Dinas dibantu oleh tiga sub bagian terdiri dari :

A. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
5. melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan losistik kantor, barang cetakan dan pengadaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material;



6. melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik dan budaya kerja;
8. melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan;
9. melaksanakan peyediaan jasa penunjang, kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
10. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
11. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan dan survey kepuasan masyarakat;
12. melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan;
13. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknik implementasi peraturan perundang-undangan;
14. menyusun konsep naskah dinas bidang umum dan kepegawaian;
15. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;



16. melaporkan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris; dan
  17. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
- B. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan;
  2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
  3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan asset
  5. melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
  6. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan pelapor dan analisis prognosis realisasi anggaran, pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan serta mengoordinasikan bahan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
  7. melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
  8. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat berat, alat angkut, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung

- kantor/bangunan lainnya dan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya;
9. melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkut darat tak bermotor;
  10. menyusun konsep naskah dinas bidang keuangan dan asset
  11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset yang telah dilaksanakan;
  12. melaporkan kegiatan subbagian keuangan dan aset kepada sekretaris; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
- C. Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas;
1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja berdasarkan sasaran dan program kerja;
  2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
  3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan evaluasi kinerja;
  5. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
  6. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD;
  7. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
  8. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, reformasi birokrasi, risk mangement, SPIP, standar pelayanan minimal, proses bisnis;

9. menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan dan evaluasi kinerja;
  10. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan;
  11. melaporkan kegiatan bidang perencanaan dan evaluasi kinerja kepada Sekretaris.
2. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air meliputi sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.

Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan program kerja bidang sumber daya air;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai,



pengelolaan dan pengembangan sitem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sitem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

A. Kelopok Sub-substansi Sumber Daya Air, Bangunan Sungai dan Pantai mempunyai uraian tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai;
5. mengusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk kontruksi bandung, embung, bangunan penampung air lainnya, air tanah dan air baku, pengendali banjir, drainse utama perkotaan dan pengaman pantai, menyusun pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kewenangan kota menyusun petunjuk teknis kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bangunan sungai dan pantai;
6. melaksanakan pembangunan, rehabilitas dan peningkatan bangunan, embung dan penampungan air lainnya, sumur air tanah dan air baku, unit air baku, tanggul sungai, bangunan perkuatan tebing, pintu air/bandung pengendali banjir, kanal banjir, stasiun pompa banjir, polder/kolam retanis, bangunan



sabo, check dam, breakwater, seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;

7. melaksanakan penyelenggaraan flood forecasting and warning system (FFWS) dan sistem informasi daerah sungai dan pantai;
  8. melaksanakan revitalisasi danau dan normalisasi/ restorasi sungai, melaksanakan pembangunan, oprasi dan pemeliharaan infrastruktur untuk melindungi mata air, melaksanakan pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan kota;
  9. melaksanakan oprasi dan pemeliharaan bendungan, embun dan penampungan air lainnya, sumur air tanah dan air baku, embung air baku, unit air baku, tanggul dan tebing sungai, kanal banjir, stasiun pompa banjir, polder/kolam retensi, bangunan sabo, check dam, breakwater, seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya, danau, sungai, melaksanakan pengelolaan kawasan lindungan sumber air, melaksanakan penyediaan air baku untuk kebutuhan masnyarakat dari sumber air;
  10. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air kewenangan kota, melaksanakan evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air wilayah sungai kewenangan kota, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air kewenangan kota;
  11. menyusun konsep naskah dinas bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai;
  12. mengepaluasi pelaksaan kegiatan bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai yang telah dilaksanakan; dan
  13. melaporkan kegiatan bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai kepada kepala bidang sumber daya air
- B. Kelompok Sub-substansi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi mempunyai uraian tugas:
1. Menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas;



2. Membagi tugas dan membagi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengelolah bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi;
5. Menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk kontruksi irigasi dan rawa, menyusun petunjuk teknis kegiatan pembangunan dan kegiatan sistem jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dan rawa, menyusun data inventaris liar area, sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
6. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, bendungan irigasi, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak, sumber jaringan irigasi air tanah, jaringan irigasi air tanah, jaringan irigasi air permukaan;
7. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa serta pemeliharaan kawasan rawa;
8. Melaksanakan operasional unit pengelola irigasi serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi;
9. Melaksanakan pembangunan komisi irigasi kota, melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pemilik kepentingan dan kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan air untuk keperluan irigasi dan rawa, melaksanakan evaluasi dan rekomendasi teknis pembangunan/pemanfaatan/pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada sistem jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi;
10. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha serta melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi daerah irigasi dan rawa;
11. Menyusun konsep naskah dinas bidang pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi;



12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi yang telah dilaksanakan; dan
  13. Melaporkan kegiatan bidang pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi kepada kepala bidang sumber daya air.
- C. Kelompok Sub-substansi pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase mempunyai uraian tugas:
1. Menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase berdasar kan sasaran dan program kerja tahunan dinas;
  2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
  3. Menyalin pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
  5. Menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan serta outline plan pada kawasan genangan;
  6. Melaksanakan supervisi pembangunan/ peningkatan/rehabilitas sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan (primer dan sekunder), melaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan (primer dan sekunder), melaksanakan peningkatan dan rehabilitas saluran drainase perkotaan dan drainase lingkungan (primer dan sekunder);
  7. Melaksanakan pembinaan teknis sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan, melaksanakan peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan pemutusan genangan;
  8. Melaksanakan penyediaan sarana sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan (pemer dan sekunder);
  9. Melaksanakan oprasi dan pemeliharaan sistem drainase, melaksanakan pengendalian daya rusak air;
  10. Melaksanakan sistem infomasi drainase dan pengendalian banjir, mengepaluasi terhadap sistem drainase dan pengendalian



banjir di wilayah kota, melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di wilayah koya;

11. Menyusun konsep naskah dinas bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang telah di laksanakan; dan
13. Melaporkan kegiatan bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase kepada kepala bidang sumber daya air.

### 3. Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi

Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang bina marga dan jasa konstruksi meliputi pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi.

Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemba ngunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembangun an, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi;

- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari :

A. Kelompok Sub-substansi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
5. Menyusun rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan (jalan K1) dan jembatan, menyusun pedoman teknis pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan jalan dan jembatan;
6. Melaksanakan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan (jalan K1);
7. Melaksanakan survey, pendataan, analisa dan evaluasi tentang status, fungsi, peta dan kondisi jalan (jalan K1)/jembatan,

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan (jalan K1)/jembatan;

8. Melaksanakan pengelolaan leger jalan (jalan K1), pembangunan jalan (jalan K1), pelebaran jalan (Jalan K1) menuju standar, pelebaran jalan (jalan K1) dan menambah lajur;
9. Melaksanakan pembangunan jembatan, *flyover*, *underpass*, terowongan/*tunnel*, melaksanakan penggantian dan pelebaran jembatan;
10. Melaksanakan penanggulangan bencana/tanggap darurat;
11. Melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawasan kegiatan pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
12. Menyusun konsep naskah dinas bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan; dan
14. Melaporkan kegiatan bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan kepada Kepala Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi.

B. Kelompok Sub-substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. Melaksanakan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan (Jalan K1);
6. Melaksanakan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian berkala jalan (Jalan K1) dan jembatan;
7. Melaksanakan rehabilitasi jalan (jalan K1);



8. Melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawasan kegiatan pemeliharaan berkala jaringan jalan dan jembatan;
  9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi sarana dan prasarana pemeliharaan berkala jalan dan jembatan;
  10. Menyusun konsep naskah dinas bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
  11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan, dan
  12. Melaporkan kegiatan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan kepada Kepala Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi.
- C. Kelompok Sub-substansi Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan jasa konstruksi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
  2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
  3. Menyelidiki pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengembangan jasa konstruksi;
  5. Menyiapkan *training need assessment* pelatihan tenaga terampil konstruksi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI, melaksanakan identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi, fasilitasi sertifikat tenaga terampil konstruksi, pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
  6. Menyusun data dan informasi proyek bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema KPDBU, potensi risiko investasi Infrastruktur, tenaga kerja dan badan usaha, ketersediaan/penggunaan material dan peralatan, profil

pekerjaan konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kecelakaan kerja proyek konstruksi, kegagalan bangunan/konstruksi;

7. Melaksanakan penyusunan peraturan dan SOP terkait penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK) Non Kecil dan Kecil, melaksanakan dukungan/fasilitasi penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis IUJK Nasional, melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Lemabaga Sertifikat Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional, melaksanakan pemantauan dan evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan;
  8. Melaksanakan penyusunan SOP/pedoman tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, melaksanakan bimbingan teknis tentang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, melaksanakan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  9. Melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi dan perizinan usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
  10. Menyusun konsep naskah dinas bidang pengembangan jasa konstruksi;
  11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan jasa konstruksi yang telah dilaksanakan; dan
  12. Melaporkan kegiatan bidang pengembangan jasa konstruksi kepada Kepala Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi.
4. Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan
- Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang, bangunan dan lingkungan meliputi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penataan bangunan dan lingkungan.



Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengekoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari :



- A. Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
  2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
  3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang;
  5. Melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan pentapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota serta Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kota, melaksanakan perencanaan pola ruang kota terutama pada kawasan yang sangat cepat pertumbuhannya dan kawasan strategis;
  6. Melaksanakan analisis data pengelolaan survey dan pemetaan ruang, orientasi lapangan, survey dan pemetaan serta pengelolaan peta dasar, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan peta manual menjadi peta digital, menyediakan peta terkait pemanfaatan ruang kota;
  7. Melaksanakan penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang;
  8. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan ruang dan penyebarluasan informasi database informasi rencana tata ruang;
  9. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW dan RRTR;
  10. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
  11. Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang;



12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang yang telah dilaksanakan; dan
  13. Melaporkan kegiatan bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang kepada Kepala Bidang Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan.
- B. Kelompok Sub-substansi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
  2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
  3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
  5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disentif bidang penataan ruang, penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang;
  6. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan tentang kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. Melaksanakan sistem informasi penataan ruang;
  8. Melaksanakan operasionalisasi tugas dan fungsi PPNS bidang penataan ruang;
  9. Melaksanakan koordinasi penataan ruang, melaksanakan analisis data pengelolaan survey dan pemetaan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian ruang, memberikan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang serta bahan rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan ruang;
  10. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat terhadap pengendalian pemanfaatan ruang;
  11. Menyusun konsep naskah dinas bidang pengendalian pemanfaatan ruang;



12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dilaksanakan; dan
  13. Melaporkan kegiatan bidang pengendalian pemanfaatan ruang kepada Kepala Bidang Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan.
- C. Kelompok Sub-substansi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan bidang penataan bangunan dan lingkungan;
  2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
  3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang penataan bangunan dan lingkungan;
  5. Menyusun rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di Kota (RTBL);
  6. Melaksanakan supervise penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungannya;
  7. Melaksanakan penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungannya (termasuk pengusungan Kota Pusaka);
  8. Melaksanakan monitoring penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungannya;
  9. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungannya;
  10. Menyusun konsep naskah dinas bidang penataan bangunan dan lingkungan;
  11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan; dan
  12. Melaporkan kegiatan bidang penataan bangunan dan lingkungan kepada Kepala Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan.

## 5. Bidang Cipta Karya dan Persampahan



Bidang Cipta Karya dan Persampahan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya dan persampahan meliputi pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan.

Bidang Cipta Karya dan Persampahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Cipta Karya dan Persampahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya dan Persampahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya dan Persampahan mengoordinasi kelompok Sb-substansi yang terdiri dari :

A. Kelompok Sub-substansi Pengembangan Permukiman mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan permukiman berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengembangan permukiman;
5. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah;
6. Melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah;
7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah;
8. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah;
9. Melaksanakan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman;
10. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi, fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan bidang pengembangan permukiman;
11. Menyusun konsep nasakah dinas bidang pengembangan permukiman;



12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan permukiman yang telah dilaksanakan; dan
  13. Melaporkan kegiatan bidang pengembangan permukiman kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Persampahan.
- B. Kelompok Sub-substansi Penataan Bangunan Gedung mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan bidang penataan bangunan gedung berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
  2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
  3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang penataan bangunan gedung;
  5. Melaksanakan penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), pendataan bangunan gedung serta implementasi SIMBG;
  6. Melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah serta melaksanakan penyusunan regulasi terkait gedung kota, melaksanakan pendataan bangunan gedung;
  7. Melaksanakan bantuan teknis pembangunan gedung Negara daerah kota, melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung Negara daerah kota, melaksanakan rehabilitasi, renovasi dan ubah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kota serta melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kota;
  8. Melaksanakan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik pemerintah kota, melaksanakan bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan cagar budaya yang ditetapkan tingkat kota, melaksanakan pemberian kompensasi, insentif dan disentif

- kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya daerah kota;
9. Melaksanakan pemilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh pemilik bangunan, melaksanakan pendaftaran huruf daftar nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara, melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi, melaksanakan pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan;
  10. Menyusun konsep naskah dinas bidang penataan bangunan gedung;
  11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penataan bangunan gedung yang telah dilaksanakan; dan
  12. Melaporkan kegiatan bidang penataan bangunan gedung kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Persampahan.
- C. Kelompok Sub-substansi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persediaan Air Minum, Air Limbah dan Persampahan mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
  2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
  3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;
  5. Melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM, sistem pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS kewenangan kota dan sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kota;
  6. Melaksanakan supervise pembangunan/ peningkatan/perluasan/perbaikan/operasi dan pemeliharaan SPAM di



- kawasan perkotaan dan melaksanakan pembangunan baru/peningkatan/ perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan kelurahan;
7. Melaksanakan supervise pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS kewenangan kota, melaksanakan pembangunan /rehabilitasi/peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS kewenangan kota serta penyediaan sarana persampahan;
  8. Melaksanakan supervise pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestic terpusat skala kota/sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman/sarana dan prasarana IPLT, melaksanakan pembangunan/penyediaan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota/sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota/sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman/sarana dan prasarana IPLT, melaksanakan pembangunan/ penyediaan sub sistem pengolahan setempat, melaksanakan penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja dan penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja;
  9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tarif air minum, terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri, terhadap SPAM oleh kelurahan dan kelompok masyarakat, terhadap pelaksanaan kerjasama SPAM serta melaksanakan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM;
  10. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan infrastruktur persampahan serta sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, melaksanakan pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik, pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah

domestik, serta melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik;

11. Menyusun konsep naskah dinas bidang pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan yang telah dilaksanakan; dan
13. Melaporkan kegiatan bidang pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Persampahan.

#### 6. UPT PRJJ dan Pemeliharaan Alat Berat

1. UPT PRJJ dan Pemeliharaan Alat Berat adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPT PRJJ dan Pemeliharaan Alat Berat dipimpin oleh seorang Kepala UPT PRJJ dan Pemeliharaan Alat Berat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT PRJJ dan Pemeliharaan Alat Berat diatur dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan

## 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang

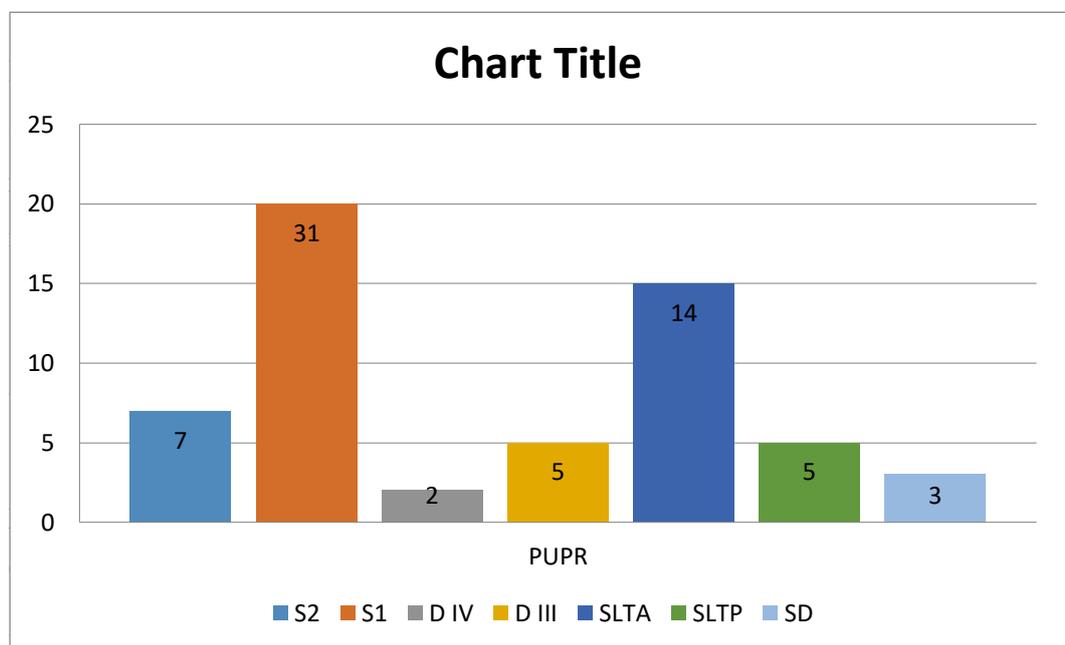
### a. Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Singkawang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dalam tahun 2022 didukung jumlah aparatur/pegawai sebanyak 67 orang, yang dirinci menurut eselon adalah sebagai berikut:



No	Eselon/Non Eselon	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	II	-	-	-	1	1
2	III	-	-	1	4	5
3	IV	-	-	1	3	4
<b>Sub Jumlah</b>		-	-	2	8	10
4	Non Eselon	7	11	39	0	57
<b>Jumlah</b>		7	11	41	8	67

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagai berikut :



Pegawai Dinas PUPR Kota Singkawang dibagi berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 8 orang, golongan III sebanyak 41 orang, golongan II sebanyak 11 orang dan golongan I sebanyak 7 orang.

Dari tabel-tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Singkawang sebanyak 67 orang, yang terdiri dari Eselon II b 1 orang, Eselon III 5 orang, Eselon IV 4 orang, fungsional 13 orang serta 44 orang Non Fungsional.

Sedangkan untuk pegawai yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan strata dua (S2) sebanyak 7 orang, lulusan strata satu (S1) sebanyak 31 orang, diploma empat (D4) sebanyak 2 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 5 orang,

lulusan SLTA sebanyak 15 orang, lulusan SLTP sebanyak 5 orang dan lulusan SD 3 orang.

Untuk meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya – upaya peningkatan profesionalisme melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

#### **b. Aset/Modal**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung dengan aset/ modal, sarana dan prasarana. Klasifikasi dan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang secara garis besar sebagai berikut :

No	Klasifikasi Inventaris	Jumlah Unit	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	Gedung/Bangunan	unit	59	1	-
2.	Kendaraan roda empat	unit	23	-	-
3.	Kendaraan roda dua	unit	44	-	-
4.	Alat Berat	unit	13	-	-
5.	Alat Uji Labolatorium	unit	40	-	-
6.	Komputer	unit	115	-	-
7.	Printer	unit	73	-	-

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang**

Adapun tingkat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabarkan pada tabel berikut :





**TABEL T-C.23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG**  
**TAHUN 2018-2022**

No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase pelayanan Administrasi perkantoran (%)				100	100	100			100	100	100			100	100	100		
	Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2020	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2020	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				12 bulan	12 bulan	12 bulan	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	36	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	36	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Cakupan jasa kebersihan kantor yang disediakan				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	75	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	75	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Cakupan jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Cakupan alat tulis kantor yang disediakan				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Cakupan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				12 bulan	12 bulan	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	12 bulan	12 bulan	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	12 bulan	12 bulan	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Cakupan makanan dan minuman yang disediakan				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Cakupan rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Cakupan jasa administrasi perkantoran yang disediakan				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	<b>Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur (%)</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	Cakupan taman yang dipelihara				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Cakupan Gedung Kantor yang direhabilitasi				100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	100	100	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Jumlah laporan keuangan yang dibutuhkan				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Jumlah laporan Renstra Perangkat Daerah				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	1	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2020	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	1	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2020	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	<b>Persentase transparansi publik (%)</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Kegiatan Expo Kinerja Perangkat Daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	1,00	1 kegiatan	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2020			1,00	1 kegiatan	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2020		
	<b>Persentase Penilaian Bobot Jabatan Dalam Penetapan Standar Gaji PNS (%)</b>				100%	100	100%				100%	100%				100%	100%		
	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	1 dokumen	1 dokumen	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022		Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022	1 dokumen				Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022	1 dokumen		
	<b>Persentase pelayanan Urusan Pemerintah Daerah (%)</b>							100	100				100						100
	<b>Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>							100	100				100						100
	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	3 dokumen				3 dokumen	3 dokumen					3 dokumen



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	
	<b>Persentase pelayanan administrasi Keuangan (%)</b>							<b>100</b>	<b>100</b>				<b>120 orang dan 8 dokumen</b>	<b>100</b>				<b>120 orang dan 8 dokumen</b>	
	Cakupan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	120 orang	130 orang				100%	130 orang				100%	
	Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	7 dokumen	7 dokumen				100%	7 dokumen				100%	
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	
	<b>Persentase pelayanan administrasi umum (%)</b>							<b>100</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Cakupan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	100	100				100	100				100	
	Cakupan alat tulis kantor yang disediakan				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	100	100				100	100				100	
	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	100	100				100	100				100	
	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	100	100				100	100				100	
	Cakupan alat tulis kantor yang disediakan				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	100	100				100	100				100	



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Cakupan rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	100	100				100	100				100	
	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	100	100				100	100				100	
	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	100	100				100	100				100	
	Cakupan jasa perbaikan peralatan kerja, cakupan makanan dan minuman yang disediakan				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	100	100				100	100				100	
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah												100%						



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan. Jumlah bahan bakar yang disediakan. Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan.				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	100	100				100%	100				100%	
	Cakupan gedung kantor yang dipelihara dan di rehabilitasi.				Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	100	100				100%	100				100%	
	<b>Indeks Tutupan Lahan</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6,3</b>	<b>6,31</b>	<b>6,32</b>										
	<b>Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>										
	<b>Rasio RTH</b>				<b>10</b>	<b>20</b>	<b>42,9</b>												
	<b>Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun (%)</b>				<b>79</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>79,00</b>	<b>78,26</b>				<b>79,00</b>	<b>78,26</b>			
	Jumlah dokumen				1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	1 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah paket media sosialisasi				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	100 orang dan 1 paket media sosialisasi	50 orang dan 1 paket media sosialisasi	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			50 orang dan 1 paket media sosialisasi	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			
	Jumlah dokumen revisi rencana tata ruang, Ranperda dan KLHS RTRW				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	3 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	3 dokumen			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	3 dokumen			
	Jumlah dokumen RTBL				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	3 dokumen	2 dokumen	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			2 dokumen	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			
	Jumlah dokumen review rencana tata ruang				5 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	5 dokumen	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	5 dokumen	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah patok pantai di kota singkawang				138 buah patok	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	138 buah patok	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	138 buah patok	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			
	Jumlah dokumen persetujuan substansi dan PERDA RTRW				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	2 dokumen	2 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			
	Jumlah peta topografi				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	1 peta topografi interval konur 1 meter tahap II	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	1 peta topografi interval konur 1 meter tahap IV	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019				kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			
	Jumlah dokumen dan data digital pemetaan				2 dokumen	1 dokumen dan 1 data digital	1 dokumen dan 1 data digital	1 dokumen dan 1 data digital	1 dokumen dan 1 data digital	2 dokumen	2 dokumen dan data digital				2 dokumen	2 dokumen dan data digital			



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah dokumen perencanaan taman kota				2 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	2 dokumen	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019				2 dokumen	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			
	Jumlah Sistem informasi geoportal				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	1 Sistem Informasi geoportal	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019				kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			
	Jumlah dokumen analisis mitigasi lahan kritis				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	1 dokumen	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019				kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			
	<b>Rasio pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata ruang</b>				<b>1:2,4</b>	<b>1:3,27</b>	<b>1:1,27</b>			<b>1:2,4</b>	<b>0.3792</b>				<b>1:2,4</b>	<b>0.3792</b>			
	Jumlah dokumen kebijakan				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019				kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1,00	1 dokumen				1 dokumen	100			
	Jumlah peta dasar dan tematik lainnya				1 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	1	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019				kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019				
	Jumlah sarana informasi tata ruang				1 web	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 web	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	1	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019				kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019				
	Jumlah lokasi taman kota yang dimanfaatkan				3 taman kota	2 taman kota	4 taman kota	3 taman kota	2 taman kota	3,00	2				2	100			
	Jumlah taman yang dipelihara				41 lokasi	36 lokasi	36 lokasi	36 lokasi	36 lokasi	41,00	29				29	81			
	Jumlah kegiatan yang difasilitasi				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019				kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019				



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah sistem informasi Geoportal				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019				kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			
	<b>Persentase ketaatan Rencana Tata Ruang(%)</b>				<b>90,22</b>	<b>90,34</b>	<b>90,47</b>	<b>90,89</b>	<b>91,05</b>	<b>90,22</b>	<b>90,34</b>				<b>90,22</b>	<b>90,34</b>			
	Jumlah masyarakat yang berperan dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang				52 orang	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	52 orang	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	52 orang	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019				52 orang	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			
	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	12 orang	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	12 orang	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	24 orang				kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2018	24 orang			
	Jumlah media sosialisasi tata ruang				3 unit	4 unit	3 unit	4 unit	4 unit	3,00	4 unit				3,00	4 unit			
	Jumlah dokumen Rekomendasi/Advis IPPT				200 rekomen dasi	150 pertimbangan teknis	150 pertimbangan teknis	150 pertimbangan teknis	150 pertimbangan teknis	200 rekomen dasi IPPT	150 rekomen dasi IPPT				200 rekomen dasi IPPT	150 rekomen dasi IPPT			



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah dokumen tipologi RTH Kota Singkawang				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen			
	<b>Persentase areal pemakaman yang dikelola (%)</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>100</b>					<b>100</b>				
	Jumlah areal pemakaman yang difasilitasi				10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019				10 lokasi	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019			
	<b>Persentase Rencana Tata Ruang yang ditetapkan</b>								<b>25</b>										
	<b>Rasio pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang</b>								<b>1:1,2</b>										
	<b>Jumlah penetapan RTRW dan RDTR Kota</b>							<b>2</b>	<b>2</b>				<b>6 dokumen</b>					<b>6 dokumen</b>	
	Jumlah dokumen				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	2 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022				2 dokumen					2 dokumen	



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah dokumen				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2 dokumen	2 dokumen				11 dokumen	2 dokumen				11 dokumen	
	Jumlah peserta sosialisasi				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	100 orang	50 orang				100 orang	50 orang				100 orang	
	Jumlah Dokumen				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	1 dokumen					1 dokumen					
	<b>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi</b>							2	2				2 dokumen					2 dokumen	
	Jumlah dokumen				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2 dokumen	2 dokumen				2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen
	Jumlah masyarakat yang ikut berperan				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	52 orang	52 orang				52 orang					52 orang	52 orang



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	jumlah sosialisasi, promosi rapat koordinasi							4	4				4 kegiatan					4 kegiatan	
	Jumlah dokumen				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2 dokumen	2 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 dokumen		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 dokumen	2 dokumen
	Jumlah sarana informasi tata ruang				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	5 unit	5 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 aplikasi		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 aplikasi	5 unit
	Jumlah rapat TKPRD, rapat Koordinasi							4	4				4 kegiatan					4 kegiatan	
	Jumlah dokumen Rekomendasi/Advis IPPT							2 dokumen dan 4 kegiatan					2 dokumen dan 4 kegiatan					2 dokumen dan 4 kegiatan	
	Jumlah Kegiatan				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2 dokumen dan 4 kegiatan	1 kegiatan	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2 dokumen dan 4 kegiatan	1 kegiatan	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2 dokumen dan 4 kegiatan	



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Jalan Mantap				53	55,3	53,79	55,93	58,29										
	Persentase Jalan Mantap				53	55,3	53,79	55,93	58,29										
	Persentase jalan yang dibangun dan ditingkatkan (%)				9	9,50	1,37			9	20,11	2,44			9	20,11	2,44		
	Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)				51,64	52,77	36,52			51,64	13,27	48,98			51,64	13,27	48,98		
	Jumlah dokumen perencanaan jalan yang disusun				8 dokumen	7 dokumen	9 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	7 dokumen	6 dokumen	5 dokumen			7 dokumen	6 dokumen	5 dokumen		
	Panjang jalan yang dibangun				6 km	3 km	6,93 km	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	7.355 km	0,23 km	7,39 km			7.355 km	0,23 km	7,39 km		



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah dokumen perencanaan jembatan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen		
	Jumlah jembatan yang dibangun				14 unit	3 unit	23 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	17 unit	6 unit	23 unit			17 unit	6 unit	23 unit		
	Panjang jalan yang ditingkatkan				7,185 km	7,400 km	6,90 km	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	28.415 km	8.66 km	20.73 km			28.415 km	8.66 km	20.73 km		
	Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan yang disusun				2 dokumen	1 dokumen	8 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	1 dokumen	4 dokumen	8 dokumen			1 dokumen	4 dokumen	8 dokumen		
	<b>Persentase jalan yang dipelihara (%)</b>				<b>4</b>	<b>6,00</b>	<b>1,76</b>			<b>4</b>	<b>1,69</b>	<b>2,48</b>			<b>4</b>	<b>1,69</b>	<b>2,48</b>		
	<b>Persentase panjang jembatan yang dipeliharaan (%)</b>				<b>14</b>	<b>16,00</b>	<b>6,96</b>			<b>14</b>	<b>1,69</b>	<b>1,69</b>			<b>14</b>	<b>1,69</b>	<b>1,69</b>		



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	1 dokumen	7 dokumen	2 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	1 dokumen	7 dokumen	2 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Panjang jalan yang direhabilitasi				4,060 km	5,350 km	3,5 km	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	4.370 km	2 km	10.96 km	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	4.370 km	2 km	10.96 km	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Jumlah ruas jalan yang dipelihara				54 ruas	62 ruas	9 km	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	50 ruas jalan	31 ruas jalan	6.82 ruas jalan	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	50 ruas jalan	31 ruas jalan	6.82 ruas jalan	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Jumlah jembatan diperbaiki				15 unit	19 unit	8 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	5 unit	6 unit	11 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	5 unit	6 unit	11 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	<b>Persentase jalan dan jembatan yang diinspeksi (%)</b>				<b>52</b>	<b>54,00</b>	<b>1,887</b>			<b>52</b>	<b>100</b>	<b>1.89</b>			<b>52</b>	<b>100</b>	<b>1.89</b>		
	Tersedianya data kondisi jalan yang lebih akurat				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	237 ruas jalan	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	226 ruas jalan	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	226 ruas jalan	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020		



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tersedianya data kondisi jembatan yang lebih akurat				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	105 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	254 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	254 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020		
	Jumlah Aplikasi pengaduan masyarakat / SMS Centre				1 paket aplikasi	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	1 paket aplikasi	kegiatan ini tidak ada di laksanakan pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	1 paket aplikasi	kegiatan ini tidak ada di laksanakan pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi				80 orang	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	80 orang	kegiatan ini tidak ada di laksanakan pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	80 orang	kegiatan ini tidak ada di laksanakan pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan jalan yang disusun				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	3 dokumen	4 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada di laksanakan pada tahun 2019	4 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	4 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah ruas jalan yang disurvei				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	20 ruas jalan	9 ruas jalan	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak di laksanakan pada tahun 2019	8 ruas jalan	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018		8 ruas jalan	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Persentase jalan dalam kondisi baik							34,97	37,28										38,49
	Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)																		
	Panjang Jalan kota dalam Kondisi baik							154,77	165										
	Jumlah jembatan dalam kondisi baik							47	51										
	Jumlah dokumen				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	1 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Luas Lahan yang dibebaskan				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2 Ha	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Jumlah dokumen				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2 dokumen	6 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	3 dokumen		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	3 dokumen	
	Jumlah jalan yang diinspeksikan												265 ruas jalan						265 ruas jalan
	Jumlah jembatan yang diinspeksikan/disurvey												93 unit						93 unit
	Panjang jalan yang dibangun				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2,50 km	2 km	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	55860 km		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	55860 km	
	Panjang jalan yang ditingkatkan				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	60,50 km	8 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	40599 km		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	40599 km	



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Panjang jalan yang di rehabilitasi				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	60,50 km	16 km	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0,268 km		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	0,268 km	
	Jumlah ruas jalan yang dipelihara				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	71 ruas		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	86 ruas jalan		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	86 ruas jalan	
	jumlah jembatan yang dibangun				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	6 unit		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	12 unit		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	12 unit	
	jumlah jembatan diperbaiki				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	25 unit	26 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	53 unit		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	53 unit	
	<b>Persentase penduduk berakses air minum</b>				<b>50</b>	<b>55</b>	<b>24,42</b>	<b>24,54</b>	<b>24,67</b>										
	<b>Persentase Masyarakat Pengguna Air Bersih</b>				<b>37,8</b>	<b>38</b>	<b>38,44</b>	<b>38,63</b>	<b>38,83</b>										
	<b>Persentase Intake dalam kondisi baik (%)</b>				<b>67,5</b>	<b>68,81</b>	<b>50</b>												
	<b>Persentase pipa transmisi dalam kondisi baik (%)</b>				<b>83</b>	<b>85,00</b>	<b>85</b>												



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sumber air baku				2 unit	2 unit	2 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Jumlah intake yang di rehabilitasi				21 unit	21 unit	21 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	<b>Persentase rumah tangga memiliki sanitasi baik (%)</b>				<b>48</b>	<b>49,00</b>	<b>92,11</b>					<b>94,11</b>					<b>94,11</b>		
	<b>Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih (%)</b>				<b>5,37</b>	<b>6,21</b>	<b>38,44</b>			<b>39,74</b>		<b>39,17</b>			<b>39,74</b>		<b>39,17</b>		
	<b>Persentase jaringan air minum yang berfungsi baik (%)</b>				<b>80</b>	<b>85,00</b>	<b>45,03</b>												
	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi lingkungan perumahan dan permukiman yang dibangun				200 unit	250 unit	56 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022			56 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022			56 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Panjang pipa air minum yang terpasang				6.760 M	7.860 M	8,522 M	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022			8,524 M	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022			8,524 M	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase jaringan air minum yang berfungsi baik (%)				80	85,00	45.03					39.17					39.17		
	Panjang pipa jaringan air bersih				12.300 M	5.122 M	5.385 M	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022			5,497 M	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022			5,497 M	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Persentase jaringan air minum yang berfungsi baik							45,26	45,48				45,26 %						
	Panjang jaringan air minum yang terpasang							335188 M	338539 M				44239 M						
	Panjang pipa yang terpasang				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	21.016 M	22.000 M	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	44239 M		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	44239 M	
	Persentase rumah tangga memiliki sanitasi baik							92,57	93,03				92,57					100	
	Jumlah rumah tangga bersanitasi baik							92,57	42983 unit				92,57					100	



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi lingkungan perumahan dan permukiman yang dibangun				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	62 unit	70 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	50 unit		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	80,64	
	<b>Persentase bangunan gedung pemerintahan yang memenuhi syarat</b>				<b>76</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>81,82</b>	<b>83,64</b>										
	<b>Persentase bangunan pemerintah yang memenuhi syarat (%)</b>				<b>76</b>	<b>77,00</b>				<b>76,00</b>	<b>69</b>								
	<b>Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik</b>						<b>69,09</b>					<b>75,44</b>							
	Jumlah bangunan gedung kantor yang dibangun dan ditingkatkan				24 unit	20 unit	17 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	24 unit	41 unit	18 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	<b>Persentase peningkatan pelayanan publik bidang PU (%)</b>				<b>100</b>					<b>100</b>									
	Jumlah sarana dan prasarana publik yang dibangun				6 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	6 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	100	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Bangunan Gedung Daerah Kota Dalam Kondisi Baik							70,91	72,73				97,50					97,50	
	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik							39 unit	40 unit				39					39	
	Jumlah rekomendasi yang diberikan							365 rekomendasi	365 rekomendasi				365					365	
	Jumlah Rekomendasi IMB, SLF, TABG dan Jumlah Aplikasi SIMBG				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	365 rekomendasi dan 1 aplikasi	365 rekomendasi dan 1 aplikasi	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	559 rekomendasi		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	559 rekomendasi	
	Jumlah Bangunan gedung daerah yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	23 unit	40 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	23 unit		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	23 unit	
	Jumlah bangunan yang di rehabilitasi dan dipelihara				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	6 unit		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	6 unit		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	6 unit	



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Jaringan irigasi yang berfungsi baik				40	45	49,23	58,91	60,34										
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)				40	45,00	49,23			40%		50.29			40%				
	Luas jaringan irigasi yang dipelihara				26 Ha	13 Ha	16 Ha	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	28 Ha		22 Ha	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	28 Ha			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Luas jaringan irigasi yang dioptimalisasi				133 Ha	133 Ha	9 Ha	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	110 Ha		33 Ha	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	110 Ha			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Luas jaringan irigasi yang dikembangkan dan ditingkatkan				11 Ha	8 Ha	10 Ha	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	11 Ha		29 Ha	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	11 Ha			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Persentase sungai/parit yang menggunakan turap/talud/bronjong							7,68	8,55				9,54						
	Persentase intake dalam kondisi baik							57,69	65,38				57,69						
	Persentase Daerah irigasi yang tertangani							10,06	17,24				10,06						



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Panjang Sungai/parit yang menggunakan turap/talud/bronjong							10,57	11,572				11,02 M					11,02 M	
	Jumlah intake dalam kondisi baik							15,00	17				15					15	
	jumlah pembangunan sarana dan prasarana sumber air baku				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 unit	1 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	7 dokumen		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	7 dokumen	
	Panjang tebing yang dibangun				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	3.691 M	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	4605,15 M		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	4605,15 M	
	Luasan kolam retensi yang dibangun				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 unit		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 unit		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 unit	
	Jumlah Intake/Embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	21 unit	1 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	3 unit		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	3 unit	
	Panjang saluran yang dibangun				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	42.27 M	21 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	67.83 M		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	67.83 M	



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Embung/penampung air yang dipelihara				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	5 unit	1 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 dokumen		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 dokumen	
	<b>Luas daerah irigasi yang ditangani</b>							<b>105</b>	<b>180</b>				<b>149 Ha</b>					<b>149 Ha</b>	
	Luas jaringan irigasi yang dikembangkan dan ditingkatkan				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	49 Ha	56 Ha	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	34 Ha		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	34 Ha	
	Luas jaringan irigasi yang dipelihara				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	40 Ha	49 Ha	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	30 Ha		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	30 Ha	
	Luas jaringan irigasi yang dioptimalisasi				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	60 Ha	75 Ha	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	29.5 Ha		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	29.5 Ha	
	<b>Persentase ketersediaan sarana persampahan regional</b>							<b>30</b>	<b>60</b>										
	<b>Zona/area layanan persampahan terbangun</b>							<b>30,00</b>	<b>60</b>				<b>30</b>					<b>30</b>	



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Jumlah Dokumen Pengelolaan Sampah Regional</b>							2 dokumen	2 dokumen				1 dokumen					1 dokumen	
	Jumlah dokumen				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 dokumen		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 dokumen	
	<b>Persentase permukiman berinfrastruktur memadai</b>							35,00	40										
	<b>Persentase Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik</b>							70,00	72,00				51,43 %					51,43 %	
	Panjang Jalan Permukiman dan Panjang Drainase Permukiman dalam Kondisi Baik							6 Km dan 4 km	7 km dan 5 km				1 km					1 km	
	Panjang jalan dan Drainase Permukiman yg di bangun				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	5 km dan 3 km	5 km dan 3 km	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 dokumen		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 dokumen	
	<b>Persentase kawasan yang tertata</b>							2,56	3,07										
	<b>Persentase Kawasan yang tertata</b>							2,56	3,07				25 dokumen					25 dokumen	
	<b>Jumlah bangunan dan lokasi lingkungan yang ditata</b>							4,00	4				25 dokumen					25 dokumen	



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah dokumen perencanaan penataan bangunan dan lingkungan				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	7 dokumen	7 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	6 dokumen		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	6 dokumen	
	Jumlah dokumen supervisi penataan/pemeliharaan bangunan				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	4 dokumen	4 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	4 dokumen		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	4 dokumen	
	Jumlah bangunan dan lokasi lingkungan yang ditata, jumlah peserta yang memahami perencanaan penataan bangunan				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	24 unit, 200 orang	6 unit, 200 orang	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	15 kegiatan		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	15 kegiatan	
	Jumlah bangunan dan lingkungan yang dipelihara				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 unit	1 unit	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 unit		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1 unit	
	Jumlah dokumen monitoring dan pengendalian				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2 dokumen	2 dokumen	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2 dokumen		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2 dokumen	
	Persentase perusahaan jasa konstruksi yang layak							50,00	70										



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase perusahaan jasa konstruksi yang layak							50	70				42,22					42,22	
	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi							200	200										
	Jumlah Dokumen				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1	1	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020		
	Jumlah Peserta				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	3	3	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020		
	Jumlah Peserta Training				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	200	200	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020		
	Jumlah sertifikat yang diterbitkan				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	200	200	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020		
	Jumlah Jasa konstruksi yang terdata di SIPJAKI							165	165										



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Dokumen				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1	1	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020		
	Jumlah Peserta				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2	2	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020		
	<b>Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan</b>							<b>165</b>	<b>165</b>										
	Jumlah Dokumen				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1	1	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020		
	Jumlah Dokumen				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1	1	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020		
	<b>Jumlah Dokumen yang disusun</b>							<b>1</b>	<b>1</b>										



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Dokumen				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	1	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022
	Jumlah Peserta				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	100	100	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020		
	Jumlah Dokumen				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	1	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	
	Luas Kawasan genangan banjir				4%	3,90	3,70												
								2190 Ha	2180 Ha	2170 Ha									
	Persentase Drainase dalam kondisi baik				40,85	42,07	61,13	63,00	65,03										
	Panjang saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik				40,85	42,07	58,93												



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -					
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Panjang saluran drainase kota yang dibangun				4.920 M	3.400 M	3.800 M	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022		
	Panjang drainase yang di rehabilitasi																			
	Panjang drainase yang di pelihara																			
	<b>Persentase sungai/parit rawan longsor dalam kondisi baik (%)</b>				<b>46,09</b>	<b>50,32</b>	<b>85,05</b>													
	Panjang tebing yang dibangun				667 M	750 M	770 M	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022			kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022		
	<b>Persentase luas genangan (%)</b>				<b>5,8</b>	<b>6,20</b>														
	<b>Persentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik (%)</b>						<b>72,67</b>													
	Panjang saluran yang dibangun				1.500 M	7.600 M	14.640 M	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022					kegiatan ini tidak ada pada tahun 2021	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2022



No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase luas kawasan genangan banjir							4,33	4,31				4,06					93,7	
	Panjang saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik							120.125	122.825				133,822 M					133,822 M	
	Panjang Drainase yang di bangun				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	17.485 M	19.625 M	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	5696 M		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	5696 M	
	Panjang Drainase yang di Rehabilitasi				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2.110 M	1.496 M	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2216 M		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	2216 M	
	Panjang Drainase yang di Pelihara				kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	47.617 M	48.639 M	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	8188 M		kegiatan ini tidak ada pada tahun 2018	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2019	kegiatan ini tidak ada pada tahun 2020	8188 M	



Tabel T-C.24

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.062.764.300	2.247.901.125	4.036.110.625	-	-	2.785.227.055	2.181.984.280	3.350.761.593	-	-	91%	97%	83%	-	-	3.115.592.017	2.772.657.643
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	621.391.000	1.164.100.742	1.017.828.669	-	-	590.461.419	1.154.035.104	1.001.502.133	-	-	95%	99%	98%	-	-	934.440.137	915.332.885
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	34.880.000	28.560.000	29.248.025	-	-	34.801.700	28.551.000	29.116.250	-	-	100%	100%	100%	-	-	30.896.008	30.822.983
4	PROGRAM PENGUATAN TRANSPARANSI PUBLIK	19.000.000	107.240.000	31.275.000	-	-	19.000.000	105.817.500	30.924.000	-	-	100%	99%	99%	-	-	52.505.000	51.913.833
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	-	-	-	9.992.936.722	10.942.301.073	-	-	-	9.376.906.725	10.517.779.692	-	-	-	94%	96%	10.467.618.898	9.947.343.209
6	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	44.769.912.975	44.363.008.024	33.687.388.820	-	-	42.632.243.696	39.981.763.113	32.982.714.653	-	-	95%	90%	98%	-	-	40.940.103.273	38.532.240.487
7	PROGRAM PEMBANGUNAN ALURAN DRAINASE/GORONG - GORONG	7.173.300.000	6.197.245.000	6.533.843.771	-	-	6.161.927.072	6.104.069.424	6.466.063.788	-	-	86%	98%	99%	-	-	6.634.796.257	9.366.030.142



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD BRONJONG	2.120.300.000	6.911.705.705	2.229.829.971	-	-	1.916.218.650	3.781.293.757	2.176.507.770	-	-	90%	55%	98%	-	-	3.753.945.225	3.937.010.089
9	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	5.757.500.000	6.886.487.185	8.635.346.943	-	-	5.388.002.380	6.677.609.018	8.409.916.372	-	-	94%	97%	97%	-	-	7.093.111.376	10.237.763.885
10	PROGRAM INSPEKSI JALAN DAN JEMBATAN	47.804.400	444.375.000	454.200.000	-	-	46.564.000	438.908.400	453.361.000	-	-	97%	99%	100%	-	-	315.459.800	469.416.700
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI. RAWA DAN JARINGAN IRIGASI LAINNYA	43.105.600.000	4.099.946.000	3.180.903.834	-	-	35.153.493.096	3.906.399.225	3.061.472.647	-	-	82%	95%	96%	-	-	16.795.483.278	21.060.682.484
12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU	3.723.800.000	2.192.165.000	1.125.406.875	-	-	3.341.654.441	1.765.046.525	1.103.207.275	-	-	90%	81%	98%	-	-	2.347.123.958	3.104.954.121
13	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	3.357.978.000	4.147.526.000	4.309.655.664	-	-	2.976.900.054	3.598.471.106	4.295.125.125	-	-	89%	87%	100%	-	-	3.938.386.555	5.435.248.143
14	PROGRAM REVITALISASI PENYEDIAAN AIR BERSIH	2.802.977.000	2.874.203.995	2.333.000.000	-	-	2.452.864.526	2.846.040.270	2.321.328.700	-	-	88%	99%	99%	-	-	2.670.060.332	3.810.116.748
15	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	1.081.679.000	4.237.735.000	4.358.608.475	-	-	927.324.180	3.091.897.300	4.085.250.400	-	-	86%	73%	94%	-	-	3.226.007.492	4.052.235.940



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN PEMERINTAH	13.874.200.000	16.107.925.000	25.023.290.234	-	-	11.165.704.278	15.456.666.270	24.032.910.509	-	-	80%	96%	96%	-	-	18.335.138.411	25.327.640.529
17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEKERJAAN UMUM	200.000.000	-	-	-	-	199.800.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	200.000.000	199.800.000
18	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	2.052.662.500	1.119.964.122	1.079.350.900	-	-	1.755.056.946	1.027.513.850	835.147.230	-	-	86%	92%	77%	-	-	1.417.325.841	1.755.056.946
19	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	1.038.250.000	799.146.000	1.398.316.425	-	-	1.001.726.547	780.998.200	1.386.712.256	-	-	96%	98%	99%	-	-	1.078.570.808	1.001.726.547
20	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	308.250.000	436.000.000	460.132.800	-	-	497.881.300	423.306.000	456.600.605	-	-	162%	97%	99%	-	-	401.460.933	497.881.300
21	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	1.112.000.000	-	-	-	-	1.108.299.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1.112.000.000	1.108.299.000
23	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	-	48.291.820.972	3.357.984.136	-	-	-	46.275.659.555	2.718.875.835	-	-	-	96%	81%	25.824.902.554	24.497.267.695
24	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	-	7.451.812.898	5.805.858.600	-	-	-	6.518.827.834	5.024.216.600	-	-	-	87%	87%	6.628.835.749	5.771.522.217



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	-	69.703.580	72.844.500	-	-	-	67.601.550	71.729.540	-	-	-	97%	98%	71.274.040	69.665.545
26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	-	2.026.741.563	3.021.704.194	-	-	-	1.960.813.292	2.982.090.790	-	-	-	97%	99%	2.524.222.879	2.471.452.041
27	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	-	10.313.785.510	7.498.796.664	-	-	-	9.988.256.706	7.474.073.250	-	-	-	97%	100%	8.906.291.087	8.731.164.978
28	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-	-	2.801.564.531	16.394.984.424	-	-	-	2.789.778.285	16.339.619.777	-	-	-	100%	100%	9.598.274.478	9.564.699.031
29	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	29.110.022.029	8.458.459.497	-	-	-	27.617.014.162	7.938.010.684	-	-	-	95%	94%	18.784.240.763	17.777.512.423
30	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	-	5.147.658.259	1.580.326.200	-	-	-	4.889.840.091	1.476.450.014	-	-	-	95%	93%	3.363.992.230	3.183.145.053
31	PROGRAM PENYELENGARAAN JALAN	-	-	-	151.008.540.169	56.085.030.855	-	-	-	142.225.852.158	41.178.213.986	-	-	-	94%	73%	103.546.785.512	91.702.033.072
32	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	-	387.461.526	155.464.200	-	-	-	20.351.250	55.451.700	-	-	-	5%	36%	271.462.863	37.901.475
33	PROGRAM PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG	-	-	-	2.018.420.029	2.055.151.700	-	-	-	1.889.192.128	1.943.716.239	-	-	-	94%	95%	2.036.785.865	1.916.454.184



#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang telah dideskripsikan pada subbab sebelumnya merupakan bagian dari analisis internal dengan melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Di sisi lain, kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat multi dimensi dan lintas sektoral, sehingga analisis internal perlu dilengkapi dengan analisis eksternal, yaitu identifikasi tantangan dan peluang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa tantangan dan peluang pengembangan dalam upaya peningkatan kinerja layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Tantangan yang utama adalah adanya *trend* pembangunan yang tidak ramah lingkungan, yang diindikasikan dengan adanya alih fungsi lahan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW (tantangan bagi bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan), jalan dalam kondisi mantap dan pengawasan teknis dan pembinaan jasa konstruksi (tantangan bagi bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi), genangan pada beberapa area di Kota Singkawang serta kualitas jaringan irigasi (tantangan bagi bidang Sumber Daya Air), serta rumah tangga pengguna air minum dan rumah tangga memiliki sanitasi, kualitas bangunan gedung pemerintah serta system pengelolaan persampahan regional (tantangan bagi bidang Cipta Karya dan Persampahan). Selama 4 tahun ke depan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang harus dapat mengintegrasikan penanganan *trend* tersebut ke dalam program dan kegiatan bidang kePUan dan Penataan Ruang.

Selain *trend* pembangunan yang tidak ramah lingkungan, terdapat tantangan lain dari segi ketidakjelasan atau tumpang tindih kewenangan tugas pokok dan fungsi antar instansi, sehingga terdapat permasalahan riil di lapangan yang tidak ditangani oleh instansi manapun dan sebaliknya, terdapat *overlap* kewenangan di beberapa instansi. Dalam konteks ini, diperlukan kejelasan kewenangan dan perbaikan tata organisasi pada level Kota. Di samping kewenangan dan tupoksi, tantangan eksternal lain berupa upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang umumnya berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, seperti aksesibilitas jalan, drainase, maupun alokasi tata ruang, sehingga keterlibatan masyarakat diharapkan dapat makin meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program dan kegiatan tersebut.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

## **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

## **KOTA SINGKAWANG**

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJP Kota, RPJM Kota, dan RTRW Kota Singkawang), evaluasi terhadap kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya, serta hasil dari rangkaian FGD (Focus Group Discussion) baik internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang maupun dengan Perangkat Daerah terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (*output*) dari program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Identifikasi isu strategis berangkat dari analisis dampak (*outcome*) dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas dan integrasi atau kerjasama dengan Dinas maupun instansi pemerintahan yang lain menjadi lebih terpetakan. Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Singkawang masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok berkaitan dengan kualitas infrastruktur dasar, air bersih, dan tata ruang. Kualitas infrastruktur dasar belum optimal sehingga masih memerlukan intervensi untuk jaringan irigasi, dan drainase yang diperlukan untuk penanganan/pengendalian banjir. Begitu juga pembangunan maupun peningkatan jalan sebagai salah satu pendongkrak perekonomian masyarakat. Masyarakat Kota Singkawang juga masih dihadapkan pada terbatasnya akses pada air bersih di beberapa wilayah. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka ditemukan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh belum optimalnya jaringan air bersih dan belum optimalnya identifikasi sumber air.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan di setiap bidang kerja yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Berikut identifikasi permasalahan di setiap bidang kerja:



#### **a. Bidang Sumber Daya Air**

1. Terdapatnya bangunan ditepian sungai/saluran sehingga mempengaruhi proses pembangunan turap/tebing
2. Lahan hibah lokasi rencana pembangunan polder/kolam retensi masih bermasalah
3. Terdapatnya bangunan ditepian sungai/saluran sehingga mempengaruhi proses pekerjaan
4. Tidak terdapatnya lokasi untuk buangan tanah hasil galian dikarenakan tidak terdapatnya sempadan sungai yang lebar
5. Petani yang tidak mau lahannya dibangun untuk fasilitas irigasi
6. Diperlukannya perencanaan masterplan jaringan irigasi dan rawa setiap kecamatan, agar dapat mengetahui luas baku, potensi dan fungsi pada lahan pertanian
7. Adanya penolakan dari masyarakat untuk di bangun Drainase dilahan dekat miliknya
8. Permukiman warga yang terlalu dekat dengan jalan sehingga sulit dilakukan pembangunan saluran dan mengatur dimensi saluran sesuai kebutuhan
9. Sungai dan saluran primer untuk pengendalian banjir mengalami pendangkalan

#### **b. Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi**

Belum seluruhnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan terdapat titik-titik kemacetan merupakan isu strategis atau permasalahan yang berada dibawah kewenangan Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi.

Terjadinya permasalahan dalam hal pembebasan lahan. Banyaknya kondisi ruas jalan yang mengalami rusak ringan/rusak berat tidak dapat terpenuhi permintaan secara tuntas dalam satu ruas. Belum tersedianya database terhadap kondisi jalan dan jembatan yang update.

Identifikasi isu strategis dibidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi berangkat dari pemahaman menyeluruh mengenai sistem transportasi regional maupun sistem transportasi perkotaan.

Dalam konteks tersebut, SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam mewujudkan *smart and sustainable transport* sehingga pembahasan isu strategis bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi tidak bisa dibatasi pada tupoksi Bina Marga dan Jasa Konstruksi, tetapi juga mencakup isu-isu lain yang terkait dengan sistem transportasi.

### c. Bidang Cipta Karya dan Persampahan

Identifikasi isu strategis di bidang Cipta Karya dan Persampahan berangkat dari pemahaman mengenai konsep penciptaan lingkungan yang sehat dan aman (*health and safety environment*) serta *sustainable development goals* (SDGs). Kedua konsep tersebut merupakan faktor penting untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagai *smart city*. Dalam konteks tersebut, tupoksi bidang Cipta Karya dan Persampahan yang terfokus pada pembangunan dan pengelolaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung dan drainase kawasan memegang peranan penting dalam pencapaian konsep *health and safety environment* serta SDGs. Konsep *health and safety environment* merupakan penjabaran dari konsep *Livable City*, yaitu mewujudkan kondisi lingkungan kota yang sehat dan aman melalui prinsip penyediaan infrastruktur perkotaan sebagai berikut (Lennard,1997):

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik).
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah).
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi.
4. Keamanan, bebas dari rasa takut.
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya.
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

Pada konteks nasional, SDGs diterjemahkan menjadi program 100-0-100 yang diusung oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, yaitu 100% akses terhadap air bersih, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses terhadap jaringan sanitasi. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung, perlu diarahkan pada perwujudan konsep *health and safety environment* dan SDGs serta berkontribusi terhadap pencapaian program 100-0-100 tersebut. Sedangkan untuk permasalahan yang berada dibawah kewenangan Bidang Cipta Karya dan Persampahan antara lain Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses air minum yang layak, masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki sanitasi yang baik, dan masih banyaknya bangunan pemerintahan dalam kondisi yang kurang baik.

### d. Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan

Identifikasi isu-isu strategis di bidang Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan berangkat dari pemahaman mengenai konsep *effective spatial planning* yang merupakan bagian penting dari perwujudan Kota Singkawang sebagai *smartcity*. Konsep *effective spatial planning* memfokuskan pada sistem

manajemen pembangunan yang baik dengan “rencana tata ruang” sebagai instrumennya.

Manajemen pembangunan sendiri didefinisikan sebagai sebuah proses untuk merencanakan, mengimplementasikan dan, mengendalikan tindakan-tindakan berbagai unsur publik dan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bagi seluruh masyarakat. Manajemen pembangunan yang baik dapat mengarahkan penggunaan sumber daya daerah supaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang paling optimal.

Dalam konteks tersebut, rencana tata ruang yang merupakan kewenangan dari bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian tata ruang. Penetapan dokumen rencana tata ruang menjadi Perda merupakan payung hukum pengawasan terhadap :

1. Implementasi dari setiap kebijakan spasial/bidang yang dihasilkan dari dokumen tata ruang.
2. Penerapan berbagai kesepakatan anggaran tiap dinas yang terkait dengan upaya realisasi rencana tata ruang.

Disamping fungsi pengawasan, penetapan Perda rencana tata ruang juga merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksud meliputi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW kota. Pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi :

1. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;
2. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
3. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
5. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
6. Melindungi kepentingan umum.

Fungsi pengawasan dan pengendalian tersebut memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, seperti Dinas Perizinan untuk proses pengajuan pemanfaatan ruang. Akan tetapi, saat ini belum seluruh kecamatan di Kota Singkawang memiliki RRTR (rencana rinci tata ruang) maupun PZ (peraturan zonasi). Ketiadaan RRTR dan PZ dapat menghambat pelaksanaan pengendalian tata ruang karena dokumen acuan untuk pengendalian secara detil masih belum ada. Selain hal diatas permasalahan yang ada dibawah kewenangan Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang dan belum optimalnya pengendalian

pemanfaatan tata ruang di Kota Singkawang.

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Singkawang masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok berkaitan dengan kualitas infrastruktur dasar, air bersih, dan tata ruang. Kualitas infrastruktur dasar belum optimal sehingga masih memerlukan intervensi untuk jaringan irigasi, dan drainase. Masyarakat Kota Singkawang juga masih dihadapkan pada terbatasnya akses pada air bersih di beberapa wilayah. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka ditemukan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh belum optimalnya jaringan air bersih dan belum optimalnya identifikasi sumber air.

**Tabel Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar	Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi	Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
	Belum optimalnya kualitas jaringan drainase	belum adanya masterplan pembangunan drainase
		belum tersedianya data yang valid terkait kondisi drainase
Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air baku	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana air minum	Belum optimalnya pembangunan jaringan air bersih
Masih adanya pelanggaran tata ruang	Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Masih kurangnya pemahaman atas aturan-aturan yang berlaku tentang rencana tata ruang Kota
Belum optimalnya akses terhadap sanitasi layak	Belum optimalnya ketersediaan sanitasi layak	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi sehat dan layak

### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Tujuan dan sasaran tahun 2023-2026. Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang. Rumusan tujuan dan sasaran tidak lepas dari amanat RPJPD Kota Singkawang 2005-2025 dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang berupa:

1. Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
5. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan bagi kelompok masyarakat miskin.
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan ekosistem.
7. Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.
8. Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

#### **Arah Pembangunan Daerah sektor Prasarana dan Sarana, yaitu:**

- Meningkatkan sistem manajemen dan prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap sebagai faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan



ketertiban dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Merealisasikan rencana pembangunan bandar udara sebagai salah satu pelayanan kepada masyarakat dan investor untuk transportasi ke dalam dan luar propinsi maupun kemancanegara dalam rangka mewujudkan Kota Singkawang sebagai pusat bisnis, industri jasa, pariwisata dan agropolitan.
- Mengoptimalkan fungsi terminal sesuai dengan status terminal, yaitu terminal dalam kota, terminal antar kota dan terminal antar negara.
- Meningkatkan fungsi pelayanan pos dan telekomunikasi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah.
- Meningkatkan peran mass-media dan cyber-media yang bebas dan bertanggung jawab untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi, dan sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif.
- Menjaga dan meningkatkan kualitas air serta pengembangan sistem distribusi air bersih secara merata dan berkeadilan dengan pengelolaan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dilakukan dengan mencari sumber energi alternatif dan peningkatan kemampuan pelayanan serta meningkatkan sistem dan manajemen penyaluran energi listrik dalam upaya penurunan tingkat kerugian teknis dan non teknis (losses).

### **3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Analisis renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk menilai sinkronisasi antara capaian kinerja dari DPUPR Kota Singkawang terhadap capaian kinerja pada bidang yang sama di level Propinsi dan nasional. Di samping itu, analisis ini juga digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi DPUPR Kota Singkawang terhadap pencapaian target kinerja di level Propinsi dan nasional. Analisis dilakukan dengan melakukan komparasi antara capaian sasaran renstra DPUPR Kota Singkawang terhadap sasaran renstra DPUPR propinsi Kalimantan Barat dan renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Hasil dari analisis tersebut akan menjadi bahan untuk memperkuat sinkronisasi program di bidang pekerjaan umum dan perumahan pada level kota – propinsi – nasional serta mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan pada level kota –propinsi –nasional.



Tabel 3.2 Komparasi Capaian Sasaran Renstra DPUPR Kota Singkawang terhadap Sasaran Renstra DPUPR Prop.Kalbar dan Renstra Kementerian PUPERA

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra DPUPR Kota Singkawang	Sasaran pada Renstra DPUPR Prop. Kalbar	Sasaran pada Renstra Kementerian PUPERA
1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	60,80%	83,08%	60%
2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	49,72%		60%
3.	Persentase panjang jalan yang dipelihara	18,52%		
4.	Persentase panjang jembatan yang dipelihara	12%		
5.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	34,33%		
6.	Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	38,89%		
7.	Persentase sungai/parit rawan longsor dalam kondisi baik	44,55%		
8.	Persentase jalan dan jembatan yang diinspeksi	50%		
9.	Persentase Intake dalam kondisi baik	66,25%		
10.	Persentase pipa transmisi air bersih dalam kondisi baik	82%		100% akses air minum



11.	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih	4,71%	54.65%	8.179 liter/detik
12.	Persentase infrastruktur air minum yang dipelihara	25%		
13.	Persentase rumah tangga memiliki sanitasi baik	45%	47.32%	
14.	Persentase luas genangan	4,2%		Luas kawasan yang Terlindung dari bahaya banjir 31.704,43 ha
15.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	24,63%		
16.	Persentase bangunan pemerintah yang memenuhi syarat	75%		
17.	Persentase peningkatan pelayanan publik bidang pekerjaan umum	90%		Pembinaan konstruksi di 56 kab/kota
18.	Persentase rencana tata ruang yang disusun	78%		
19.	Persentase ketaatan rencana tata ruang	90%		

Komparasi antara capaian renstra DPUPR Kota dan sasaran renstra DPUPR Propinsi Kalimantan Barat dan Renstra Kementerian PUPERA hanya dapat dilakukan secara garis besar, karena beberapa indikator kinerja DPUPR Kota Singkawang mengatur hal-hal yang kewenangannya berada pada tingkat kabupaten sehingga tidak muncul pada target sasaran di level propinsi ataupun nasional.

### 3.2.1 Telaah Renstra pada Kementerian PUPERA dan Kementerian ATR

Telaah renstra pada Kementerian PUPERA dilakukan dengan melakukan review terhadap sasaran jangka menengah Kementerian PUPERA dan identifikasi permasalahan yang dihadapi DPUPR Kota Singkawang untuk mencapai sasaran

tersebut. Identifikasi permasalahan juga mencakup identifikasi faktor penghambat dan pendorong. Secara lebih detail, komparasi terhadap sasaran renstra Kementerian PUPERA dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1  
Komparasi terhadap Sasaran Renstra Kementerian PUPERA

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian	Permasalahan Pelayanan DPUPR Kota Singkawang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya layanan Jaringan irigasi dan rawa	Masyarakat membutuhkan pembangunan fasilitas pintu air sesuai dengan kebutuhan area lahan pertanian	Terdapat oknum masyarakat petani yang menolak dibangunnya fasilitas bangunan pintu air untuk mengairi area sawah	Masyarakat pemakai air untuk lahan pertanian sangat membutuhkan pembagian air yang merata ke area persawahan
2.	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan	Sumber air baku tidak mencukupi (kualitas dan kuantitasnya)	Adanya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)	Penghijauan/Pelestarian sumber air baku
3.	Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir	Sungai dan saluran primer untuk pengendali banjir mengalami pendangkalan	Tepian sungai/saluran primer sudah banyak permukiman penduduk sehingga akses menuju lokasi sulit	Adanya pembersihan secara manual

4.	Meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah	Masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan terutama jalan kota/daerah sedangkan jalan nasional ditangani oleh pusat	Keterbatasan anggaran	Tambahan sumber dana/ anggaran baik dari Propinsi maupun dari Pemerintah pusat melalui proposal
5.	Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan	Jaringan air bersih belum terpenuhi dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sanitasi	Adanya kebocoran jaringan air bersih dan kurangnya sosialisasi tentang sanitasi	- Tambahan sumber dana APBN - Pemukiman penduduk masih belum padat
6.	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang	Kegiatan pembangunan belum sepenuhnya menngacu pada rencana tata ruang	Sebagian wilayah belum memiliki RDTR dan PZ yang sudah ditetapkan dalam bentuk Perda	RTRW Kota Singkawang telah ditetapkan dengan Perda

### 3.2.2 Telaah Renstra DPUPR

Telaah renstra pada DPUPR Propinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan melakukan review terhadap sasaran jangka menengah renstra DPUPR dan identifikasi permasalahan yang dihadapi DPUPR Kota Singkawang untuk mencapai sasaran tersebut. Identifikasi permasalahan juga mencakup identifikasi faktor penghambat dan pendorong. Secara lebih detail, komparasi terhadap sasaran renstra DPUPR dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2  
Komparasi terhadap Sasaran Renstra DPUPR Prop. Kalbar

	Sasaran Jangka	Permasalahan	Sebagai Faktor
--	----------------	--------------	----------------



No	Menengah Renstra DPUPR	Pelayanan DPUPR Kota Singkawang	Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Tata Ruang	Inkonsistensi pemahaman RTRW	Kesesuaian lokasi terhadap kebutuhan daerah dalam hal pembangunan sarana dan prasarana	Adanya sinergitifitas antara Propinsi dengan Kab/Kota
2.	Peningkatan, pembinaan, dan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur terbangun kurang dari 70%</li> <li>- Tidak ada lagi tenaga honorer terhadap penjaga bangunan air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kepedulian masyarakat pengguna air terhadap bangunan atau infrastruktur pengairan</li> <li>- Politikalwil dari pemerintah terhadap ketersediaan infrastruktur pengairan perlu ditingkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poktan (Kelompok Tani) dan masyarakat sadar lingkungan</li> <li>- Politikalwil pemerintah pusat maupun pemerintah daerah</li> </ul>
3.	Pengendalian kualitas pelaksanaan konstruksi bidang ke-PU-an yang mantap dan terukur melalui pengujian dengan didukung oleh sumber daya masyarakat jasa konstruksi yang profesional	Jumlah SDM dan kualitas di bidang jasa konstruksi masih kurang	Belum adanya seksi yang menangani jasa konstruksi	Tertibnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang konstruksi



4.	Meningkatkan kemampuan pegawai yang profesional di bidang infrastruktur ke-PUan dengan didukung oleh anggaran, sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan tata laksana organisasi dengan prinsip Good Government	Jumlah SDM yang profesional di bidang infrastruktur ke-PUan belum memadai	Proses sertifikasi yang masih kurang objektif dan mahal sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga profesional dan terampil di bidang infrastruktur ke-PUan masih jauh dari cukup	Adanya prasarana dan sarana pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM di bidang infrastrukturke-PUan
----	---	---	---	---

### 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 berpedoman pada tujuan RTRW Kota Singkawang 2022-2042, yaitu penataan ruang wilayah Kota Singkawang sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri serta perdagangan dan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan dengan menyusun kebijakan dan strategi penataan ruang yang terdiri atas:

- a. Pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai kota wisata unggulan;
- b. Pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;
- d. Perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata;
- e. Perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan;
- f. Pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan;
- g. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;



- h. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
- i. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang Kota Singkawang, ditetapkan Strategi penataan ruang wilayah yaitu:

- a) Strategi pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah yang terdiri atas:
  - a. Menetapkan kawasan pemerintahan kota dan kawasan komersial yang memiliki jangkauan pelayanan regional sebagai bagian dari kawasan strategis;
  - b. Menata jaringan prasarana dan simpul transportasi darat dalam rangka menjaga kelancaran lalu lintas lokal dan regional di kawasan pusat kota;
  - c. Menata kawasan terbangun khususnya kegiatan-kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor;
  - d. Mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi;
  - e. Mengembangkan sistem jaringan drainase yang efektif dan efisien dalam rangka menghindari terjadinya banjir; dan
  - f. Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat kota.
- b) Strategi untuk pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah, terdiri atas:
  - a. Menjaga berfungsinya secara optimal pusat- pusat pelayanan yang sudah ada;
  - b. Mendorong berfungsinya pusat-pusat pelayan kegiatan yang baru;
  - c. Meningkatkan keterkaitan antar-pusat pelayanan dalam wilayah kota, dan antara pusat-pusat pelayan dengan daerah layanannya yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
  - d. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat pelayanan yang agar sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota.
- c) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata, terdiri atas:
  - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, serta keterpaduan intra dan antarmoda;
  - b. Membangun jaringan jalan baru yang diarahkan untuk menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota dengan pusat-pusat lingkungan serta jalan alternatif untuk mengantisipasi kemacetan pada ruas-ruas jalan yang sangat berpotensi mengalami



- kemacetan dalam masa rencana;
- c. Membangun Jalan Lingkar Barat (by pass) yang menghubungkan Jalan Kaliasin sampai Jalan Ratu Sepudak (Semelagi Kecil) yang berfungsi sebagai jalan arteri;
  - d. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
  - e. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara optimal;
  - f. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber daya air, serta meningkatkan pengendalian daya rusak air; dan
  - g. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi drainase, air minum, persampahan, pengolahan limbah, angkutan umum, jalur pejalan kaki, kegiatan sektor informal, dan jalur evakuasi bencana.
- d) Strategi perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata, terdiri atas:
- a. Menetapkan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya;
  - b. Melindungi dan memelihara kawasan yang merupakan situs cagar budaya dengan cara pengamanan, perawatan, dan pemugaran;
  - c. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
  - d. Pengembangan kawasan untuk Bumi Perkemahan di sekitar Danau Sarantangan di Kelurahan Sagatani, Kebun Botani di Kelurahan Bagak Sahwa, kebun koleksi di Kelurahan Nyarumkop dan Bagak Sahwa, serta konservasi di luar habitat alami (ex situ) di Gunung Besar di Kelurahan Sedau dan di kaki Gunung Raya di Kelurahan Bagak Sahwa untuk menunjang pengembangan wisata pendidikan dan budidaya tanaman hortikultura; dan
  - e. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata.
- e) Strategi peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
  - b. Mengembangkan kegiatan pada kawasan wisata alam dan budaya tanpa merusak kelestariannya dengan membaginya kedalam zona lindung dan budi daya;
  - c. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata; dan
  - d. Mengembangkan desa wisata sebagai kesatuan dari atraksi wisata alam maupun budaya untuk meningkatkan perekonomian dan partisipasi masyarakat.

- f) Strategi perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan terdiri atas:
  - a. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata; dan
  - b. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata
- g) Strategi pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan, terdiri atas:
  - a. Menetapkan kawasan industri di Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan dan pergudangan, serta rencana jalur rel kereta api;
  - b. Membangun kanal pengendali banjir yang menghubungkan bagian hulu dari Sungai Sedau dengan muara Sungai Jamthang untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kawasan industri;
  - c. Mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan lingkungan khusus untuk kawasan industri;
  - d. Mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitasnya dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan;
  - e. Mendorong pengembangan sektor industri ke arah pengembangan dan pemanfaatan sentra- sentra industri kecil dan aneka industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan; dan
  - f. Mendorong pengembangan kawasan industri yang dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri.
- h) Strategi perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdiri atas:
  - a. Menetapkan kawasan lindung;
  - b. Melestarikan ekosistem kawasan cagar alam;
  - c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung selain dari kawasan cagar alam yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  - d. Mengalokasikan peruntukan ruang terbuka hijau kota dengan luas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, dengan ruang terbuka hijau publik lebih dari 20% dari luas wilayah kota; dan
  - e. Mengembangkan Kerjasama dengan kabupaten yang berbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.
- i) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terdiri atas:



- a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan cagar alam, kawasan resapan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, RTH hutan kota, sempadan danau, sempadan sungai, dan sempadan pantai;
  - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
  - d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  - e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan
  - g. Mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam
- j) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, terdiri atas:
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak di kawasan pusat kota;
  - b. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air untuk mempertahankan ketersediaan sumber air;
  - c. Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
  - d. Melakukan penyempurnaan secara berkala terhadap ketentuan-ketentuan peraturan zonasi yang telah ditetapkan terutama dalam rangka mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau teknologi baru;
  - e. Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dan pantai; dan
  - f. Menata kawasan perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir.

Rencana struktur ruang wilayah Kota Singkawang meliputi sistem pusat pelayanan, dan sistem jaringan prasarana.

### 1. Sistem Pusat Pelayanan

Sistem pusat pelayanan di daerah terdiri atas Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran dan pelayanan umum yang terletak di Kecamatan Singkawang Barat.
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) meliputi:
  - 1) SPPK I berfungsi sebagai simpul transportasi udara serta pusat permukiman, perdagangan dan jasa berada di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan;
  - 2) SPPK II berfungsi sebagai simpul transportasi laut, pusat kegiatan pariwisata, serta perdagangan dan jasa yang berada di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan;
  - 3) SPPK III yang berfungsi sebagai pusat pelayanan umum, perdagangan dan jasa, berada di Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara;
  - 4) SPPK IV yang berfungsi sebagai pusat permukiman dan pariwisata berada di Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur; dan
  - 5) SPPK V berada yang berfungsi sebagai pusat pariwisata, perdagangan dan jasa berada di Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi:
  - 1) Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan Semelagi Kecil, kecamatan Singkawang Utara;
  - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara;
  - 3) Pusat Pelayanan Lingkungan Naram, Kecamatan Singkawang Utara;
  - 4) Pusat Pelayanan Lingkungan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur;
  - 5) Pusat Pelayanan Lingkungan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan; dan
  - 6) Pusat Pelayanan Lingkungan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan.

### 2. Sistem Jaringan Prasarana

Sistem Jaringan Prasarana yang ada di daerah merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan.

- a. Sistem Jaringan Transportasi, meliputi:



1) Sistem jaringan jalan; terdiri atas:

a) Jalan umum, terdiri atas:

(1) Jalan arteri; terdiri atas:

- Jalan arteri primer, terdiri atas jalan Aliyang, sebagian Jalan Tebas-Singkawang, sepanjang 49,72 km (empat puluh sembilan koma tujuh puluh dua kilometer), Batas Kota Singkawang-Sei. Duri dan sebagian jalan Ahmad Yani, sepanjang 0,14 km (nol koma empat belas kilometer)
- Jalan arteri sekunder, terdiri atas Jalan Merdeka, Jalan Diponegoro, Sebagian jalan Ahmad Yani, sepanjang 1,23 km (satu koma dua puluh tiga kilometer), Sebagian jalan Tebas-Singkawang sepanjang 1,45 km (satu koma empat puluh lima kilometer).

(2) Jalan kolektor, terdiri atas:

- Jalan kolektor primer, terdiri atas Jalan Sudirman; dan Jalan Pahlawan
- Jalan kolektor sekunder, terdiri atas Jalan Baru, Jalan Budi Utomo, Jalan Bun Fui, Jalan Conglongkong Trans, Jalan Demang Akub, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Firdaus HR, Jalan Firdaus HR II, Jalan Firdaus III, Jalan GS. Lalanang, Jalan Gunung Kaba', Jalan H. Bakar, Jalan Hamid Matali, Jalan Hermansyah, Jalan Jembatan 25, Jalan Kepol Mahmud, Jalan Kridasana, Jalan Kurau, Jalan Lingkar Timur, Jalan Mahad Usman, Jalan Matang Lintang, Jalan Mesjid Raya, Jalan Mesjid Sei Bulan, Jalan Niaga, Jalan Nusantara, Jalan P. Antasari, Jalan Padat Karya Sungai Wie, Jalan Pangmilang SP1-SP2, Jalan Pelita, Jalan Pemuda, Jalan Pertanian, Jalan Perwira, Jalan Poros Pajintan, Jalan Pramuka, Jalan R. A. Kartini, Jalan Raya Sagatani, Jalan Raya Sebakuan, Jalan Sama-Sama, Jalan Saman Bujang, Jalan Sanggau Kulor, Jalan Sejahtera, Jalan Semai, Jalan SM. Tsjafioeddin, Jalan Stasiun, Jalan Tani SMP VII, Jalan Trans Semelagi, Jalan Trisula, Jalan Veteran, Jalan Veteran Ujung, Jalan Wonosari, dan Jalan Yunus Yakob.

(1) Jalan lokal, dan

(2) Jalan lingkungan berupa jalan lingkungan sekunder tersebar di seluruh Kota Singkawang.

b) Jalan khusus, yaitu Jalan Tanjung Bajau dari Kawasan Wisata Palm



Beach menuju Sinka Island Park,

c) Jalan tol, terdiri dari:

(1) Jalan tol yang menghubungkan Pontianak-Mempawah-Bengkayang-Singkawang, dan

(2) Pintu Tol Singkawang berada di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan.

d) Terminal penumpang, terdiri atas:

Terminal penumpang tipe A, berupa Terminal Singkawang yang ditetapkan di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah,

(1) Terminal penumpang tipe C, meliputi:

– Terminal Beringin di Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah,

– Terminal Pasiran di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat,

– Terminal di Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara,

– Terminal di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan, dan

– Terminal di Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur

e) Terminal barang, yaitu rencana lokasi terminal barang berada di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, dan

f) Jembatan timbang, yaitu rencana revitalisasi penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan pengaktifan kembali Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedau.

2) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, berupa:

a) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, berupa alur-pelayaran kelas II yang menghubungkan Kota Singkawang dengan Pelabuhan Pulau Tambelan, dan

b) Pelabuhan Penyeberangan, yaitu Pelabuhan Sedau Singkawang yang ditetapkan di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

3) Sistem jaringan transportasi laut, terdiri dari:

a) pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Singkawang yang berada di Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, dan

b) pelabuhan perikanan, berupa pangkalan pendaratan ikan berada di Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat dan



Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

- 4) Bandar udara umum dan bandar udara khusus, berupa:
  - a) Bandar Udara umum, berupa Bandar Udara Pengumpan. Bandar Udara pengumpan yaitu Bandar Udara Singkawang di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, dan
  - b) Bandar Udara khusus, yaitu Bandar Udara Smart Semelagi di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara.
- b. Sistem Jaringan Energi, terdiri atas:
  - 1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, merupakan jaringan minyak dan gas bumi yang berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen melintasi Ruas Jalan yang terdiri atas Jalan Raya Sedau, Jalan Batas Kota Singkawang-Sungai Duri, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Merdeka, Jalan Bambang Ismoyo, dan Jalan Ratu Sepudak.
  - 2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri atas:
    - a) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Sungai Wie di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah dan PLTD Sudirman di Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, dan
    - b) Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
      - (1) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT), terdapat di:
        - Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Setapak Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Garam, Kelurahan Naram di Kecamatan Singkawang Utara,
        - Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Sungai Wie, dan Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah,
        - Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat,
        - Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan, dan
        - Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur.
      - (2) Jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas,



- Saluran udara tegangan menengah (SUTM), terdapat di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal di Kota Singkawang, dan
  - Saluran udara tegangan rendah (SUTR), terdapat di seluruh wilayah Kota Singkawang.
- (3) Gardu listrik berupa gardu induk, terdapat di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah.
- c. Sistem Jaringan Telekomunikasi, terdiri atas:
- 1) Jaringan tetap, terdiri atas:
    - a) Jaringan tetap yang akan dikembangkan di seluruh Kota Singkawang, dan
    - b) Infrastruktur jaringan tetap berupa landasan dari kabel bawah laut Palapa Ring yang terletak di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
  - 2) Jaringan bergerak, terdiri atas:
    - a) Jaringan bergerak terestrial, dikembangkan di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, dan
    - b) Jaringan bergerak seluler berupa Base Transceiver Station (BTS) dikembangkan di Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Singkawang Selatan, Kecamatan Singkawang Barat, Kecamatan Singkawang Timur, dan Kecamatan Singkawang Tengah.
- d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air, berupa prasarana sumber daya air yang terdiri atas:
- 1) Sistem jaringan irigasi, terdiri atas:
    - a) Jaringan irigasi primer berupa anak sungai yang mengalir melintasi beberapa kelurahan yang terdiri dari:
      - (1) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan,
      - (2) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur, dan
      - (3) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah.
    - b) Jaringan irigasi sekunder berada pada kawasan-kawasan pertanian yang tersebar di beberapa kelurahan meliputi:
      - (1) Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan,

- (2) Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Mayasopa, dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur,
- (3) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, dan
- (4) Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat
- c) Jaringan irigasi tersier mengalir melintasi beberapa kelurahan yang terdiri dari:
  - (1) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan,
  - (2) Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur, dan
  - (3) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah.
- 2) Sistem pengendalian banjir, berupa kolam retensi terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, dan
- 3) Bangunan sumber daya air, terdiri atas:
  - a) Embung terletak di Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara, Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan,
  - b) Pintu Air terletak di:
    - (1) Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat,
    - (2) Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kelurahan Singkawang Selatan,
    - (3) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Utara, dan
    - (4) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah
  - c) Prasarana Irigasi terletak di:
    - (1) Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat,
    - (2) Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kelurahan Singkawang Selatan,
    - (3) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan

Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Utara, dan

(4) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah.

e. Infrastruktur Perkotaan, terdiri atas:

1) SPAM, terdiri atas:

a) Jaringan perpipaan, meliputi:

(1) Unit air baku, terdiri dari:

- Unit air baku berupa intake yang terdapat di:

- Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan,
- Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat,
- Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur, dan
- Kelurahan Semelagi Kecil dan Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara.

- Jaringan air baku yang tersebar di beberapa kelurahan meliputi:

- Kelurahan Mayasopa, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan, dan Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur,
- Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, dan
- Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, dan Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara

(2) Unit produksi, terdiri atas:

- Unit produksi berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA) terdiri dari Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan Sungai Bulan dan Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara.
- Unit produksi berupa reservoir yang terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah.
- Jaringan produksi meliputi:



- Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Pajintan di Kelurahan Singkawang Timur,
  - Kelurahan Roban, Kelurahan Condong, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Sungai Wie, di Kecamatan Singkawang Tengah, dan
  - Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara
- (3) Unit distribusi, berupa jaringan distribusi yang tersebar hampir di seluruh Kota Singkawang kecuali Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur.
- (4) Bukan jaringan perpipaan, terdiri dari sumur pompa terdapat di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan Pajintan, Mayasopa, Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur, dan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan.
- 2) SPAL, terdiri atas:
- a) Sistem pengelolaan air limbah non domestik terletak di:
- (1) Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu di Kecamatan Singkawang Barat,
  - (2) Kelurahan Roban, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Sungai Wie, Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah,
  - (3) Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan,
  - (4) Kelurahan Setapak Kecil di Kecamatan Singkawang Utara, dan
  - (5) Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur
- b) Sistem pengelolaan air limbah domestik, terdiri dari:
- (1) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, meliputi:
    - Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur,
    - Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah, dan
    - Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan
  - (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa penanganan limbah rumah tangga pada kawasan padat

permukiman dengan pembangunan WC, septic tank rumah tangga atau septic tank bio filter yang tersebar di seluruh kelurahan sesuai kebutuhan.

- 3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), berada di dekat kawasan pengolahan sampah perkotaan TPA Wonosari di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah dan pada Kawasan Peruntukan Industri yang terdapat di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan,
- 4) Sistem jaringan persampahan, terdiri atas:
  - a) Tempat penampungan sampah sementara (TPS), terdapat di:
    - (1) Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara,
    - (2) Kelurahan Sungai Wie, Kelurahan Roban, dan Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah,
    - (3) Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu di Kecamatan Singkawang Barat,
    - (4) Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Utara, dan
    - (5) Kelurahan Pajintan di Kecamatan Timur
  - b) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terdapat di Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah

Tempat Pemrosesan Akhir sampah yakni TPA Wonosari terdapat di Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah

- 5) Sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas:
  - a) Jalur evakuasi bencana mengikuti jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan di Kota Singkawang, dan
  - b) Tempat evakuasi bencana memanfaatkan lapangan olahraga, fasilitas umum, RTH, kantor pemerintah dan bangunan besar lain yang aman dari bencana
- 6) Sistem drainase, terdiri atas:
  - a) Jaringan drainase primer, terdapat di: Sungai Singkawang, Sungai Sedau, Sungai Air Merah, Sungai Semelagi Kecil, Sungai Pinang, Sungai Selakau, Sungai Air Putih, Sungai Air Hitam, Sungai Setapak Besar, Sungai Setapak Kecil, Sungai Sei. Rasau, Sungai Sei. Bulan, Sungai Nangka, Sungai Garam, Sungai Wie, Sungai Sakok, dan Sungai Jamthang.
  - b) Jaringan drainase sekunder terdapat disepanjang kanan dan kiri



jaringan jalan dengan fungsi arteri, kolektor dan sebagian lokal di Kota Singkawang.

- c) Jaringan drainase tersier meliputi jaringan drainase yang terdapat disepanjang kanan dan kiri jaringan jalan dengan fungsi jalan lokal di Kota Singkawang.
  - d) Jalur sepeda, berupa pengembangan jalur sepeda yang berada di sebagian ruas jalan Jalan Ahmad Yani, Jalan Firdaus HR, Jalan SM. Tsjafioeddin, Jalan Diponegoro, Jalan Pemuda, Jalan Merdeka, Jalan Setiabudi, Jalan Sejahtera, Jalan Kalimantan, Jalan Sudirman, dan Jalan Nusantara.
- 7) Jaringan pejalan kaki, berupa pengembangan jalur pejalan kaki yang berada di sebagian ruas jalan Kota Singkawang khususnya pada kawasan pendidikan, perkantoran, perdagangan dan jasa, dan pariwisata yang terdiri dari Jalan Firdaus HR, Jalan Dr. Sutomo, Jalan P. Antasari, Jalan SM. Tsjafioeddin, Jalan Yos Sudarso, Jalan Aliyang, Jalan Ahmad Yani, Jalan Firdaus HR II, Jalan Diponegoro, Jalan Merdeka, Jalan Pemuda, Jalan Nusantara, Jalan Perwira, Jalan R.A Kartini, Jalan Satria, Jalan Bintara, Jalan Sudirman, Jalan Kalimantan, Jalan GS. Lalanang, Jalan Yohana Godang, dan Jalan GM. Situt.

## **B. Rencana Pola Ruang**

Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah meliputi:

### **1. Kawasan Lindung**

Rencana pola ruang kawasan lindung terdiri atas:

- a. Badan air, adalah sebagian badan air yang berada di Kota Singkawang, dengan luas kurang lebih 265 ha (dua ratus enam puluh lima hektare), yaitu: Sungai Singkawang, Sungai Sedau, Sungai Air Merah, dan Sungai Selakau, Sungai Setapak Besar, Sungai Garam, Sungai Wie, Embung Panjintan, dan Danau Serantangan.
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan lindung gambut. Kawasan lindung gambut memiliki luas kurang lebih 287 ha (dua ratus delapan puluh tujuh hektare), terdapat di:
  - 1) Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan, dan
  - 2) Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan



- c. Kawasan perlindungan setempat, memiliki luas kurang lebih 397 ha (tiga ratus sembilan puluh tujuh hektare) yang terletak di sekitar Sungai Acoi, Sungai Garam, Sungai Merah, Sungai Pasi, Sungai Sedau, Sungai Setapak Besar, Sungai Transad, Sungai Wie, Sungai Singkawang, Danau serantangan, Danau Biru, dan Kawasan Pantai di Kecamatan Singkawang Selatan
- d. Ruang terbuka hijau, memiliki luas 7.749 ha (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan hektare), terdiri atas:
  - 1) Rimba Kota, memiliki luas kurang lebih 7.355 ha (tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima hektare) yang terletak di:
    - a) Kelurahan Kuala dan Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat,
    - b) Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sedau dan Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan,
    - c) Kelurahan Roban dan Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah,
    - d) Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Mayasopa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Sanggau Kulor Kecamatan Singkawang Timur, dan
    - e) Kelurahan Naram, Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Setapak Kecil, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Garam Hilir dan Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara
  - 2) Taman Kota, memiliki luas kurang lebih 221 ha (dua ratus dua puluh satu hektare) tersebar di seluruh Kota Singkawang:
    - a) Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapak Besar, dan Kelurahan Setapak Kecil di Kecamatan Singkawang Utara,
    - b) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan,
    - c) Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Tengah di Kecamatan Singkawang Barat, dan
    - d) Kelurahan Roban, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah.
  - 3) Taman Kecamatan, memiliki luas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektare) terletak di Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara.
  - 4) Taman Kelurahan, memiliki luas kurang lebih 7 ha (tujuh hektare) terletak di:
    - a) Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan dan Kelurahan Sungai

- Rasau, Kecamatan Singkawang Utara, dan
- b) Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat
- 5) Pemakaman, dengan luas kurang lebih 154 ha (seratus lima puluh empat hektare) yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.
- e. Kawasan konservasi, berupa kawasan suaka alam (KSA). Kawasan suaka alam (KSA) merupakan cagar alam Gunung Raya Pasi di Kota Singkawang dengan luas kurang lebih 2.479 ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan hektare) terletak di Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan dan Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan.
- f. Kawasan ekosistem mangrove, dengan luasan kurang lebih 137 ha (seratus tiga puluh tujuh hektare), terdapat di:
- 1) Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah,
  - 2) Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat,
  - 3) Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kelurahan Naram, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara, dan
  - 4) Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan.

## 2. Kawasan Budi Daya

Kawasan Budi Daya meliputi:

- a. Badan jalan, meliputi sebagian badan jalan yang tersebar di seluruh Kota Singkawang, dengan luas kurang lebih 220 ha (dua ratus dua puluh hektare).
- b. Kawasan hutan produksi, meliputi:
  - 1) Kawasan hutan produksi tetap dengan luasan kurang lebih 5.183 ha (lima ribu seratus delapan puluh tiga hektare), terdapat di:
    - a) Kelurahan Mayasopa dan Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur, dan
    - b) Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Rasau di Kecamatan Singkawang Utara.
  - 2) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luasan kurang lebih 0,28 ha (nol koma dua delapan hektare) terdapat di



Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

c. Kawasan pertanian, terdiri atas:

- 1) Kawasan tanaman pangan, dengan luasan kurang lebih dengan luas kurang lebih 10.995 ha (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima hektare), terdapat di:
  - a) Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Setapak Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara,
  - b) Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Roban, dan Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah,
  - c) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan,
  - d) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur, dan
  - e) Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat.
- 2) Kawasan hortikultura, dengan luasan kurang lebih 702 ha (tujuh ratus dua hektare) tersebar di seluruh Kota Singkawang:
  - a) Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur, dan
  - b) Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan
- 3) Kawasan perkebunan, dengan luasan kurang lebih 9.819 ha (sembilan ribu delapan ratus sembilan belas hektare), terdapat di:
  - a) Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Mayasopa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Sanggau Kulor, dan Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur,
  - b) Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Setapak Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara,
  - c) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan, dan
  - d) Kelurahan Roban dan Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah
- 4) Kawasan peternakan, dengan luasan kurang lebih 2.266 ha (dua ribu dua ratus enam puluh enam hektare), terdapat di:
  - a) Kelurahan Naram dan Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan



- Singkawang Utara,
- b) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah,
  - c) Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop dan Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur, dan
  - d) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan
- d. Kawasan perikanan, terdiri dari:
- 1) Kawasan perikanan tangkap, dengan luasan kurang lebih 62 ha (enam puluh dua hektare) terdapat di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah.
  - 2) Kawasan perikanan budi daya, dengan luasan kurang lebih 53 ha (lima puluh tiga hektare) terdapat di Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Sungai Rasau, dan Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara.
- e. Kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
- 1) Kawasan pertambangan mineral, terdiri atas:
    - a) Kawasan peruntukan pertambangan batuan, dengan luasan kurang lebih 203 ha (dua ratus tiga hektare), terdapat di:
      - (1) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah,
      - (2) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur, dan
      - (3) Kelurahan Sedau dan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan.
    - b) Kawasan pertambangan mineral bukan logam, dengan luasan kurang lebih 230 ha (dua ratus tiga puluh hektare) terdapat di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan.
  - 2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik, dengan luas kurang lebih 6 ha (enam hektare), terdapat di Kelurahan Roban, Kelurahan Sungai Wie dan Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah.
- f. Kawasan peruntukan industri, terdapat di Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Sedau dengan luas kurang lebih 208 ha (dua ratus delapan hectare).
- g. Kawasan pariwisata, dengan luas kurang lebih 1.255 ha (seribu dua ratus lima puluh lima hektare), terdiri atas:
- 1) Kawasan Mangrove Setapak di Kecamatan Singkawang Utara,
  - 2) Taman Pasir Panjang Indah di Kecamatan Singkawang Selatan,
  - 3) Palm Beach di Kecamatan Singkawang Selatan,

- 4) Tanjung Bajau di Kecamatan Singkawang Selatan,
  - 5) Pantai Batu Burung di Kecamatan Singkawang Selatan,
  - 6) Danau Serantangan di Kecamatan Singkawang Selatan,
  - 7) Taman Rekreasi Bukit Bougenville di Kecamatan Singkawang Selatan,
  - 8) Taman Rekreasi Chidayu Indah di Kecamatan Singkawang Selatan,
  - 9) Dayang Resort di Kecamatan Singkawang Selatan,
  - 10) Batu Belimbing di Kecamatan Singkawang Timur,
  - 11) Wisata Mangrove Kuala di Kecamatan Singkawang Barat, dan
  - 12) Taman Rekreasi Teratai Indah di Kecamatan Singkawang Barat.
- h. Kawasan permukiman, terdiri atas:
- 1) Kawasan perumahan, dengan luasan kurang lebih 10.086 ha (sepuluh ribu delapan puluh enam hektare) yang tersebar diseluruh Kota Singkawang.
  - 2) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, memiliki luas kurang lebih 363 ha (tiga ratus enam puluh tiga hektare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.
  - 3) Kawasan infrastruktur perkotaan, memiliki luas kurang lebih 68 ha (enam puluh delapan hektare) yang terdapat di:
    - a) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sagatani, dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan,
    - b) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, dan
    - c) Kelurahan Sanggau Kulor di Singkawang Timur
- i. Kawasan perdagangan dan jasa, dengan luasan kurang lebih 1.455 ha (seribu empat ratus lima puluh lima hectare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang,
- j. Kawasan perkantoran, dengan luasan kurang lebih 45 ha (empat puluh lima hektare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang,
- k. Kawasan transportasi, memiliki luas 279 ha (dua ratus tujuh puluh sembilan hektare) yang terdapat di:
- 1) Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat,
  - 2) Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan,
  - 3) Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah, dan
  - 4) Kelurahan Semelagi Kecil di Kecamatan Singkawang Utara.
- l. Kawasan pertahanan dan keamanan, dengan luas kurang lebih 194 ha (seratus sembilan puluh empat hektare), terdapat di:
- 1) Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Jawa, Kelurahan Condong, dan Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang

Tengah,

- 2) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan,
- 3) Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Tengah di Kecamatan Singkawang Barat, dan
- 4) Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur.

Kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri dari:

- 1) Sekolah Calon Tamtama (Secata) dan Sartaif Tentara Nasional Indonesia Markas Komando Resimen Induk Daerah Militer XII Tanjungpura, di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan,
- 2) Lapangan Tembak Rindam di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan,
- 3) Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) XII Tanjungpura di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan,
- 4) Komando Distrik Militer (Kodim) 1202/ Komando Rayon Militer (Koramil) 1202-16/Sedau, di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan,
- 5) Sekolah Polisi Negara (SPN) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan,
- 6) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Satuan Korps Brigade Mobil (Brimob)/Detasemen B Pelopor, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan,
- 7) Komando Rayon Militer (Koramil) 1202- 05/Singkawang Barat, di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat,
- 8) Komando Distrik Militer (Kodim) 1202/Singkawang, di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat,
- 9) Kepolisian Resor (Polres) Singkawang di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat,
- 10) Detasemen Polisi Militer (Denpom) XII/1 Sintang, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat,
- 11) Perumahan Polisi/ Tentara di Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat,
- 12) Brigade Infantri (Brigif)19/Khatulistiwa di Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah,
- 13) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Singkawang, di Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah,
- 14) Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Batalyon Infanteri Raider 641/Beruang, di Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur,



- 15) Mess Singkawang Lapangan Udara (Lanud) Hadi Soemantri, di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, dan
- 16) Kepolisian Sektor (Polsek) di Kecamatan Singkawang Tengah, Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Selatan.



Identifikasi isu-isu strategis kemudian dipertajam dengan tinjauan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis-analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa KLHS wajib disertakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup.

Terdapat 6 kajian dalam KLHS, yaitu (1) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, (2) perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, (3) kinerja layanan/jasa ekosistem, (4) efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, (5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan (6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.



Tabel 3.6 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS Kota Singkawang	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Kota Singkawang
Kapasitas daya dukung dandaya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Program perencanaan tata ruang dapat membawa pengaruh negatif (contoh kerusakan lingkungan) jika alokasi ruang tidak disesuaikan dengan daya dukung dan daya	Alih fungsi lahan tidak boleh mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Alokasi ruang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung
Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Dampak dan resiko lingkungan hidup akibat pembangunan antara lain peningkatan <i>runoff</i> , pengurangan area resapan (termasuk RTH), peningkatan limbah, pencemaran, kemacetan	Kajian dampak dan resiko lingkungan hidup diperlukan sebagai bagian dari perizinan sebelum program pembangunan dilaksanakan	Kontrol dan pengawasan terhadap persyaratan perizinan lingkungan untuk setiap pembangunan sarana dan prasarana
Kinerja layanan/jasa ekosistem	Program pembangunan sarana dan prasarana berpotensi alih fungsi lahan dan mengurangi RTH yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem	Alokasi RTH dalam rencana tata ruang perlu dipenuhi dan dijaga agar tidak terjadi alih fungsi lahan	Pembangunan RTH dan penghijauan di sepanjang jalan Penegakan peraturan penataan ruang
Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam	Pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur pedesaan berpotensi memicu alih fungsi lahan dan urbanisasi sehingga terjadi inefisiensi pemanfaatan SDA yang diindikasikan dengan adanya penurunan muka air tanah, pencemaran lingkungan, dan kemacetan	Program pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana menggunakan konsep hemat energi sehingga tercapai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Pembangunan sarana dan prasarana (olahraga, ekonomi, pendidikan, perkantoran) dengan konsep <i>greenbuilding</i>
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana berpotensi meningkatkan <i>runoff</i> dan mengurangi RTH sehingga menjadikan Kota Singkawang rentan terhadap perubahan iklim (indikasi adanya genangan di beberapa lokasi)	Perbaikan drainase ataupun kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya perlu mempertimbangkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Sistem drainase yang dibangun/diperbaiki harus harmonis dengan lingkungan perkotaan Pembangunan drainase jalan yang ramah lingkungan Perlunya sosialisasi pelarangan pembuangan air limbah maupun sampah padat disaluran drainase beserta penegakan aturan
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Adanya potensi alih fungsi lahan jika pemanfaatan ruang tidak terkendali yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan (kurangnya ketahanan dan keanekaragaman hayati)	Perlunya program dan kegiatan yang fokus pada pengawasan dan pengendalian rencana tata ruang	Menegakkan peraturan penataan ruang

Berdasarkan bidang kajian KLHS, terdapat beberapa aspek yang memiliki pengaruh terhadap bidang kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Aspek tersebut diantaranya adalah (1) pentingnya analisis daya dukung dan daya tampung dalam alokasi tata ruang Kota Singkawang, (2) tingginya laju konversi lahan pertanian kelahan terbangun, serta (3) kurang optimalnya pengendalian tata ruang. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan yang berpusat pada aspek pengendalian tata ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal ini dengan memberi prioritas pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Di sisi lain, rencana program dan kegiatan yang bertumpu pada alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun (contoh: pembangunan sarana ekonomi, pembangunan jalan dan jembatan, serta pengembangan perumahan) perlu dilakukan dengan konsep yang menekankan pada harmonisasi dengan alam dan diperketat pada proses perizinan kajian dampak lingkungan sebelum pembangunan tersebut dilaksanakan.

Berikut tabel yang menunjukkan identifikasi permasalahan berdasarkan analisis KLHS:

Tabel 3.7 Komparasi terhadap Telaah KLHS

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi DPUPR Kota Singkawang	Permasalahan Pelayanan DPUPR Kota Singkawang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Analisis daya dukung (terutama ketersediaan air tanah) tidak mencukupi (cenderung defisit)	Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (RDTR dan PZ belum ada dan belum di Perdakan) sehingga sulit untuk mengontrol pemanfaatan ruang	Proses legalisasi RDTR dan PZ Cenderung lama  Keterbatasan kapasitas SDM untuk melakukan analisis daya dukung	Perda RTRW sebagai payung hukum pengendalian pemanfaatan ruang walaupun belum terlalu rinci
2.	Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim (peningkatan suhu di daerah perkotaan dan peningkatan intensitas hujan)	Jaringan drainase di Kota Singkawang belum dirancang untuk menghadapi kerentanan terhadap perubahan iklim	Analisis tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim belum dilakukan karena keterbatasan SDM, data, dan teknologi	Analisis tingkat kerawanan bencana telah mulai dilakukan

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah visi, misi, program Walikota dan Wakil Walikota, telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi, serta telaah RTRW dan KLHS, dapat dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Perangkat Daerah dari faktor-faktor eksternal lainnya. Secara lebih spesifik, isu-isu strategis tersebut dapat diidentifikasi berdasar isu strategis pada lingkup internasional, nasional, ataupun regional/lokal sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur dasar yang berkelanjutan

Sesuai RPJPD Kota Singkawang pada Tahap ke-4, pembangunan infrastruktur ditargetkan dapat mencapai pembangunan berbagai bidang sebagai berikut:

- Bidang Transportasi:

Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dengan target sepanjang  $\pm 350$  Km, pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan sebanyak 30 unit, pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang  $\pm 85$  Km, pembangunan dan peningkatan jembatan  $\pm 15$  unit. Peningkatan infrastruktur dan fungsi Bandar Udara Singkawang. Peningkatan Status dan Pelayanan Pelabuhan Laut Singkawang.

- Bidang Sumber Daya Air:

Bidang Sumber Air (Daerah Irigasi & Daerah Rawa) : perbaikan tanggul 22.500 M', perbaikan pintu air 12 unit, pembuatan pintu air 30 unit, perbaikan saluran 75.000 M', pembuatan saluran 40.000 M', pembuatan Jalan Usaha Tani 1.400 M', perbaikan bangunan pelengkap 20 unit, perbaikan bangunan bendung 18 unit, pembuatan bangunan bendung 5 unit dan normalisasi sungai 12.000 M'.

- Bidang Sumber daya air : peningkatan pelayan air bersih.

Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mencapai target akhir RPJPD Kota Singkawang khususnya Tahap ke-4 yaitu untuk Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Tabel Identifikasi Isu-Isu Strategis terhadap RPD Kota Singkawang

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis	
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026	
1	2	3	4	5	6	
TPB Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Ekonomi	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi.	Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.	Merealisasikan rencana pembangunan bandar udara sebagai salah satu pelayanan kepada masyarakat dan investor untuk transportasi ke dalam dan luar propinsi maupun kemancanegara dalam rangka mewujudkan Kota Singkawang sebagai pusat bisnis, industri jasa, pariwisata dan agropolitan.	-	Belum selesainya proses pembangunan Bandar udara Singkawang
	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim			Menjaga dan meningkatkan kualitas air serta pengembangan sistem distribusi air bersih secara merata dan berkeadilan dengan pengelolaan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.		

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis	
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026	
1	2	3	4	5	6	
TPB Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang dan belum tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah.	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan ekosistem.	Menegakan supremasi hukum dan kepastian hukum masyarakat serta peraturan daerah.	-	Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik



Isu-isu strategis dalam konteks ini merupakan isu yang perlu mendapat prioritas penanganan melalui program dan kegiatan dari DPUPR Kota Singkawang. Identifikasi prioritas tersebut ditandai dengan isu yang kerap disebut (ditemui) dalam telaah-telaah sebelumnya. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dari masing-masing bidang kerja DPUPR Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

Tabel Isu-Isu Strategis yang Menjadi Prioritas DPUPR Kota Singkawang

Unit Kerja	Aspek	Permasalahan	Rekomendasi Prioritas Kegiatan	Keterangan
Bina Marga dan Jasa Konstruksi	Pembangunan jalan	Terdapat titik-titik kemacetan	Penyusunan rencana sistem transportasi perkotaan	
	Peningkatan jalan	Terdapat titik-titik kemacetan	Penyusunan rencana sistem transportasi perkotaan	
Sumber Daya Air	Drainase	Belum terdapat masterplan drainase	Penyusunan masterplan drainase	
		Belum terdapat analisis/peta potensi genangan/banjir	1. Pemetaan genangan 2. Pembuatan sumur resapan	
Cipta Karya dan Persampahan	Air bersih	1. Cakupan air bersih belum 100% 2. Kualitas air bersih tidak terpantau, terutama pada rumah tangga	Penambahan jaringan air bersih	Kerjasama dengan PDAM
	Limbah	Bercampurnya pembuangan limbah rumah tangga disaluran drainase	Sosialisasi dan monitoring untuk mencegah masuknya limbah ke saluran drainase	Diperlukan koordinasi dengan DLH
Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan	Pemanfaatan ruang	Tidak optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang karena RDTR dan PZ sebagai instrumen pengendalian belum diPerdakan	Legalisasi dan implementasi RDTR dan PZ	
		Belum ada mekanisme yang jelas mengenai tindakan penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang	Monitoring pelanggaran pemanfaatan ruang	Diperlukan kerjasama dengan BAPPEDA dan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, SatPol PP

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu ***“Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan”***.

Dar sasaran pokok pembangunan daerah, dijabarkan menjadi arah pembangunan daerah, dimana sasaran yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yaitu:

1. Arah Pembangunan Daerah sektor Prasarana dan Sarana, dengan merealisasikan rencana pembangunan bandar udara sebagai salah satu pelayanan kepada masyarakat dan investor untuk transportasi ke dalam dan luar propinsi maupun kemancanegara dalam rangka mewujudkan Kota Singkawang sebagai pusat bisnis, industri jasa, pariwisata dan agropolitan.
2. Arah pembangunan daerah sektor Tata Ruang, yaitu:
  - Wilayah Singkawang Tengah dan sebagian wilayah Singkawang Barat diarahkan sebagai pusat kegiatan perdagangan grosir dan jasa komersial, pusat pengembangan industri sedang hingga besar, pusat pemerintahan kota serta pusat permukiman penduduk.
  - Wilayah Singkawang Utara diarahkan fungsinya sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura (sayuran dan buah-buahan) dan budidaya ikan tambak, serta pengembangan permukiman penduduk.
  - Wilayah Singkawang Timur diarahkan sebagai pusat pengembangan pertanian lahan gambut. Di samping itu juga diberikan fungsi penting sebagai pintu gerbang timur Kota Singkawang dan pusat pengembangan pendidikan yang diarahkan ke bagian selatan wilayah Singkawang Timur.
  - Wilayah Singkawang Selatan ditetapkan sebagai pusat pengembangan agrowisata, perkebunan, peternakan, pariwisata dan kelautan.



**TABEL T-C.25**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			
						2023	2024	2025	2026
	2	3	6	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar		Persentase penduduk berakses air minum	Persen	48,71	49,42	49,75	50,06	50,36
			Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	93,50	93,80	94,08	94,20	94,57
		Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan sanitasi yang baik	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan dan non perpipaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	3,37	3,75	4,12	4,48	4,84
			Persentase Perencanaan Sistem pengelolaan sampah regional	Persen	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi		Persentase Jalan mantap	Persen	52,35	53,02	54,12	55,30	56,41
			Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	Persen	4,10	3,73	3,69	3,66	3,64
			Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	73,52	75,45	76,86	77,41	81,61
		Peningkatan pemenuhan infrastruktur pengembangan ekonomi	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	38,42	38,30	39,10	40,12	41,07
			Persentase jasa konstruksi yang layak	Persen	84,44	50,00	55,26	60,53	69,74
			Persentase Drainase yang terbangun	Persen	1,27	3,01	2,35	2,13	2,01
			Persentase Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS Kab/Kota	Persen	8,33	8,50	8,75	9,02	9,29
			Persentase jalan permukiman dalam kondisi baik	Persen	32,72	34,90	37,03	39,10	41,12
			Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Persen	70,59	72,06	73,53	75,00	76,47
3	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan		Ketaatan terhadap RTRW	Persen	34,23	96,24	97,05	98,19	99,20
		Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian tata ruang	Persentase rencana tata ruang	Persen	14,29	28,57	57,14	85,71	100
			Persentase kawasan yang tertata	Persen	8,30	8,45	8,62	14,35	21,79

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun kedepan. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah :



**TABEL T-C.26**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KOTA SINGKAWANG**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan sanitasi yang baik	Peningkatan pengelolaan air bersih	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		Peningkatan pengelolaan sanitasi	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
			Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi		Penyelenggaraan jalan
			Pengembangan jasa konstruksi
			Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
			Pengelolaan sumber daya air
			Pengembangan permukiman
		Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung	Penataan bangunan gedung
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Meningkatnya pemanfaatan ruang dan bangunan serta lingkungan sesuai dengan RTRW	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang	Penyelenggaraan penataan ruang
			Penataan bangunan dan lingkungannya

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah merupakan cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang adalah :

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - 3) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD



- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2) Pendataan dan Pengelolah Administrasi Kepegawaian
  - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - 4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan
  - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 7) Penyediaan Bahan/Material
  - 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pengadaan Alat Besar
  - 3) Pengadaan Mabel
  - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak bermotor
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kabupaten/Kota
    - 2) Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
    - 3) Penataan Bangunan dan Lingkungan
    - 4) Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
    - 5) Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
  - a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
    - 1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
    - 2) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
    - 3) Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
    - 4) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
    - 2) Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
    - 2) Sistem Informasi Penataan Ruang
  - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberiaan Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
    - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
    - 3) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
  - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM AIR LIMBAH
  - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Pembangunan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
6. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
  - a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Penyusunan Rencana, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/TPS-3R/TPS Kewewenangan Kabupaten/Kota
    - 2) Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPA-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 3) Penyediaan Sarana Persampahan
7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
  - a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
    - 1) Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implentansi SIMBG
    - 2) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsual, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
8. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
  - a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam satu area Kabupaten/Kota
    - 1) Pembangunan Embung dan Penampungan Air lainnya
    - 2) Pembangunan Bangunan Perkutaan Tebing
    - 3) Pembangunan Polder/Kolam Retensi



- 4) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
- 5) Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau
- 6) Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
- 7) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
- b. Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Atu) Daerah Kab/Kota
  - 1) Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
  - 2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
  - 3) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa
9. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
  - a. Penyelenggaraan Insfrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Pembangunan dan Pengembangan Insfrastuktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
    - 2) Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
    - 3) Pengawasan dan Pengendalian Insfratraktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
  - a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
    - 1) Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan
    - 2) Pengelolaan Lenger Jalan
    - 3) Survey Kondisi Jalan/Jembatan
    - 4) Pembangunan Jalan
    - 5) Rekonstruksi Jalan
    - 6) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan
    - 7) Pembangunan Jembatan
    - 8) Rehabilitasi Jembatan
    - 9) Pemeliharaan Rutin Jembatan
    - 10) Penanggulangan bencana/tanggap darurat
11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
  - a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Trampil Konstruksi
    - 1) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
  - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kab/Kota
    - 1) Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi



- 2) Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
  - c. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
    - 1) Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
    - 2) Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
    - 3) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
12. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
- a. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kab/Kota
    - 1) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
    - 2) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
    - 3) Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase

TABEL T-C.27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2023-2026**

Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
							2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	
		1.3.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	Persen		100	10.188.000.000	100	11.206.800.000	100	12.327.480.000	100	13.560.228.000	100	47.282.508.000	Dinas PUPR Kota Singkawang
		1.3.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		100	40.000.000	100	52.000.000	100	60.000.000	100	68.000.000	100	220.000.000	
		1.3.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	10.000.000	2	12.000.000	2	14.000.000	2	16.000.000	2	52.000.000	
		1.3.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		3	5.000.000	3	8.000.000	3	10.000.000	3	12.000.000	3	35.000.000	
		1.3.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		4	15.000.000	4	18.000.000	4	20.000.000	4	22.000.000	4	75.000.000	



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	
		1.3.1.201.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		6	10.000.000	2	14.000.000	2	16.000.000	2	18.000.000	2	58.000.000	
		1.3.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Keuangan perangkat daerah (%)	Persen		100	6.635.000.000	100	7.215.760.000	100	7.545.000.000	100	8.148.000.000	100	29.543.760.000	
		1.3.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		70	6.000.000.000	70	6.500.000.000	70	6.800.000.000	70	7.300.000.000	70	26.600.000.000	
		1.3.1.202.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1	600.000.000	1	674.000.000	1	700.000.000	1	800.000.000	4	2.774.000.000	
		1.3.1.202.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1100	20.000.000	1100	22.760.000	1100	23.000.000	1100	25.000.000	1100	90.760.000	
		1.3.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		2	10.000.000	2	12.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	2	48.000.000	
		1.3.1.202.6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		4	5.000.000	4	7.000.000	4	9.000.000	4	10.000.000	4	31.000.000	
		1.3.1.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	Persen		100	11.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	26.000.000	100	72.000.000	



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	
		1.3.1.203.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		4	3.000.000	4	4.000.000	4	5.000.000	4	8.000.000	4	20.000.000	
		1.3.1.203.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		2	5.000.000	2	6.000.000	2	8.000.000	2	10.000.000	2	29.000.000	
		1.3.1.203.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		12	3.000.000	12	5.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000	12	23.000.000	
		1.3.1.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	Persen		100	113.600.000	100	140.700.000	100	169.300.000	100	212.400.000	100	636.000.000	
		1.3.1.205.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		100	100.000.000	125	125.000.000	125	150.000.000	125	189.000.000	125	564.000.000	
		1.3.1.205.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		120	3.600.000	120	4.200.000	120	4.800.000	120	5.400.000	120	18.000.000	
		1.3.1.205.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.500.000	1	8.000.000	1	25.000.000	
		1.3.1.205.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		100	5.000.000	100	6.000.000	100	8.000.000	100	10.000.000	100	29.000.000	



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	
		1.3.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Persen		100	699.000.000	100	809.540.000	100	1.022.560.000	100	1.134.428.000	100	3.665.528.000	
		1.3.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		12	45.000.000	12	52.000.000	12	55.000.000	12	65.000.000	12	217.000.000	
		1.3.1.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12	75.000.000	12	85.000.000	12	100.000.000	12	120.000.000	12	380.000.000	
		1.3.1.206.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		12	15.000.000	12	17.000.000	12	19.000.000	12	21.000.000	12	72.000.000	
		1.3.1.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	40.000.000	12	115.000.000	
		1.3.1.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12	75.000.000	12	80.540.000	12	98.560.000	12	105.428.000	12	359.528.000	
		1.3.1.206.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		24	9.000.000	24	10.000.000	24	15.000.000	24	20.000.000	24	54.000.000	
		1.3.1.206.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	130.000.000	
		1.3.1.206.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	130.000.000	
		1.3.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	385.000.000	12	450.000.000	12	600.000.000	12	640.000.000	12	2.075.000.000	



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	
		1.3.1.206.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	43.000.000	12	133.000.000	
		1.3.1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	Persen		100	200.000.000	100	175.000.000	100	180.000.000	100	200.000.000	100	755.000.000	
		1.3.1.207.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		50	100.000.000	30	50.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	210.000.000	
		1.3.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		7	100.000.000	9	125.000.000	10	150.000.000	10	170.000.000	10	545.000.000	
		1.3.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100	2.089.400.000	100	2.358.800.000	100	2.660.620.000	100	2.991.400.000	100	10.100.220.000	
		1.3.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	280.000.000	12	290.000.000	12	330.000.000	12	350.000.000	12	1.250.000.000	
		1.3.1.208.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		12	80.000.000	12	90.000.000	12	95.000.000	12	100.000.000	12	365.000.000	
		1.3.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	1.729.400.000	12	1.978.800.000	12	2.235.620.000	12	2.541.400.000	12	8.485.220.000	



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11	12	13
		1.3.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persen		100	400.000.000	100	440.000.000	100	670.000.000	100	780.000.000	100	2.290.000.000	
		1.3.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		14	200.000.000	16	220.000.000	16	270.000.000	16	330.000.000	16	1.020.000.000	
		1.3.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2	200.000.000	2	220.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000	2	1.270.000.000	
Meningkatnya pembangunan infrastruktur, penataan ruang, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah				Persen	58,97	63,67	68,67	73,67	78,67	78,67						
	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar				Persentase penduduk berakses air minum	Persen	48,71	49,42	49,75	50,06	50,36	50,36					
					Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen	93,50	93,80	94,08	94,2	94,57	90					
	1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan dan non perpipaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	100	100	12.234.000.000	100	12.356.340.000	100	12.479.903.400	100	12.604.702.434	100	49.674.945.834	Kota Singkawang	
	1.3.3.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan air minum yang berfungsi baik	Meter		44.448	12.234.000.000	39.373	12.356.340.000	43.873	12.479.903.400	48.373	12.604.702.434	48.373	49.674.945.834		



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11	12	13
		1.3.3.201.5	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Panjang pipa yang terpasang	Liter/detik		34.873	12.234.000.000	39.373	12.356.340.000	43.873	12.479.903.400	48.373	12.604.702.434	48.373	49.674.945.834	
		1.3.4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase perencanaan sistem pengelolaan sampah regional	Persen	100	100	74.068.288	100	74.476.217	100	74.549.061	100	75.000.697	100	298.094.263	Kota Singkawang
		1.3.4.201	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sampah Regional	Dokumen	2	1	74.068.288	1	74.476.217	1	74.549.061	1	75.000.697	1	298.094.263	
		1.3.4.201.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen	Dokumen	1	1	74.068.288	1	74.476.217	1	74.549.061	1	75.000.697	1	298.094.263	Kota Singkawang
		1.3.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	3,37	3,75	3.016.514.632	4,12	3.033.128.009	4,48	3.036.094.683	4,84	3.054.488.065	4,84	12.140.225.389	Kota Singkawang
		1.3.5.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga bersanitasi baik	Unit	45013	45913	3.016.514.632	46.831	3.033.128.009	47768	3.036.094.683	48723	3.054.488.065	48723	12.140.225.389	



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11	12	13		
		1.3.5.201.3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Domestik Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Unit	70	72	3.016.514.632	74	3.033.128.009	76	3.036.094.683	80	3.054.488.065	80	12.140.225.389			
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi				Persentase Jalan Mantap	Persen	52,35	53,02		54,12		55,3		56,41		56,41				
				Persentase Genangan /Banjir Kota Singkawang	Persen	4,10	3,73		3,69		3,66		3,64		3,64		3,64		
				Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	73,52	75,45		76,86		77,41		81,61		81,61		81,61		
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	Persen	38,42	38,3	51.261.351.678	39,1	53.824.419.262	40,12	55.170.029.744	41,07	56.273.430.339	42,31	216.529.231.023		Kota Singkawang			
1.3.10.201	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan kota dalam Kondisi baik	Kilometer	170,4	174,4	51.261.351.678	178,6	53.824.419.262	182,9	55.170.029.744	187,25	56.273.430.339	187,25	216.529.231.023					
		Jumlah jembatan dalam kondisi baik	Unit	120	125		127		129		134		134						
1.3.10.201.2	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas lahan yang dibebaskan	Hektare		10	2.500.000.000	10	2.500.000.000	9	2.500.000.000	9	2.500.000.000	9	10.000.000.000					
1.3.10.201.3	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	-	-	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	750.000.000					
1.3.10.201.4	Survey Kondisi Jalan / Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	Km	265	265	553.272.500	265	564.337.950	265	575.624.709	265	587.137.203	265	2.280.372.362					
1.3.10.201.5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan	Kilometer		11,17	33.512.695.443	13,98	41.949.202.517	14,34	43.013.903.172	14,53	43.582.336.917	14,53	162.058.138.050					



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	
		1.3.10.201.8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	Kilometer		3,47	5.200.000.000	3,63	5.450.000.000	3,73	5.600.000.000	3,93	5.900.000.000	3,93	22.150.000.000	
		1.3.10.201.11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		35	35	1.627.490.486	45	1.727.614.059	50	1.780.356.167	55	1.835.209.592	55	6.970.670.304	
		1.3.10.201.12	Pembangunan jembatan	Panjang Jembatan/Box Culvert yang Dibangun	Unit		6	6.950.000.000	2	500.000.000	2	600.000.000	5	750.000.000	5	8.800.000.000	
		1.3.10.201.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan/Box Culvert yang di Rehab	Unit		7	300.000.000	6	250.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	950.000.000	
		1.3.10.201.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Unit	10	12	61.643.249	13	70.889.736	15	81.523.196	17	93.751.676	17	307.807.857	
		1.3.10.201.21	Penanggulangan bencana/tanggap darurat	Panjang jalan yang dipelihara	Kilometer		0,5	250.000.000	0,5	250.000.000	0,5	250.000.000	0,5	250.000.000	0,5	1.000.000.000	
				Jumlah jembatan/Box Culvert yang dipelihara	Unit		1		1		1	1	1				
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa konstruksi yang layak	Persen	84,44	100	184.015.278	100	185.028.738	100	185.209.713	100	186.331.757	100	740.585.486	Kota Singkawang
		2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi	Orang		40	133.515.278	40	134.528.738	40	134.709.713	40	135.831.757	40	538.585.486	
		2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Training	Orang		40	133.515.278	40	134.528.738	40	134.709.713	40	135.831.757	40	538.585.486	
		2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Jasa konstruksi yang terdata di SIPJAKI	Persen		100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000,00	100	16.000.000	100	64.000.000	



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	
		2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa	Cakupan pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		
		2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Peserta	Orang		2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	64.000.000	
		2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen	Dokumen		1	34.500.000	2	34.500.000	1	34.500.000	2	34.500.000	2	138.000.000	
		2.04.03	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen	Dokumen		1	34.500.000	1	34.500.000	1	34.500.000	1	34.500.000	1	138.000.000	
		1.3.6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase yang terbangun	Persen	1,27	3,01	10.858.000.000	2,35	11.292.320.000	2,13	11.744.012.800	2,01	12.213.773.312	2,01	46.108.106.112	Kota Singkawang
		1.3.6.201	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	Meter	133.821,64	18.276	10.858.000.000	17.986	11.292.320.000	17.519	11.744.012.800	16.116	12.213.773.312	16.116	46.108.106.112	
		1.3.6.201.5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Meter	133.821,64	6.776	8.636.554.867	5.417	8.354.458.811	5.030	8.533.003.360	4.835	9.023.269.942	4.835	34.547.286.981	



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	
		1.3.6.201.7	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Meter	13.181,00	500	1.414.266.807	546	1.870.367.852	543	2.044.265.689	490	2.031.210.649	490	7.360.110.997	
		1.3.6.201.9	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Meter	18.199,48	11.000	807.178.327	12.023	1.067.493.337	11.946	1.166.743.750,68	10.791	1.159.292.719,96	10.791	4.200.708.134	
		1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur pengendalian banjir di WS Kab/Kota	Persen	8,33	8,5	2.250.745.876	8,75	2.263.141.801	9,02	2.265.355.360	9,29	2.279.079.420	9,29	9.058.322.457	Kota Singkawang
		1.3.2.201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai/parit yang menggunakan turap/talud/bronjong	Meter		11.229,25	1.400.000.000	11.272,44	1.407.710.464	11.315,67	1.409.087.333	11.359,17	1.417.623.918	11.359,17	5.634.421.715	
				Jumlah intake dalam kondisi baik	Unit	19	21		23		25		25				
		1.3.2.201.6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit		1	200.000.000	1	201.101.495	1	201.298.190	1	202.517.702	1	804.917.388	
		1.3.2.201.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Meter		107,38	500.000.000	107,97	502.753.737	108,08	503.245.476	108,73	506.294.256	108,73	2.012.293.470	
		1.3.2.201.14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit		1	100.000.000	1	100.550.747	1	100.649.095	1	101.258.851	1	402.458.694	
		1.3.2.201.21	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit		1	100.000.000	1	100.550.747	1	100.649.095	1	101.258.851	1	402.458.694	



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	
		1.3.2.201.46	Normalisasi/Restorasi / Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Meter		2.659,97	400.000.000	2.674,62	402.202.990	2.677,23	402.596.380	2.693,45	405.035.405	2693,45	1.609.834.776	
		1.3.2.201.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit		3	100.000.000	3	100.550.747	3	100.649.095	3	101.258.851	3	402.458.694	
		1.3.2.202	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi yang ditangani	Hektare		21	850.745.876	24	855.431.337	27	856.268.026	30	861.455.501	30	3.423.900.741	
		1.3.2.202.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	Kilometer		15	475.365.360	16	477.983.423	17	478.450.934	18	481.349.503	18	1.913.149.221	
		1.3.2.202.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Kilometer		4	288.049.563	5	289.635.988	6	289.919.278	7	291.675.678	7	1.159.280.507	
		1.3.2.202.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kilometer		2	87.330.953	3	87.811.926	4	87.897.814	5	88.430.320	5	351.471.014	
		1.3.7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan Permukiman dalam kondisi baik	Persen	32,72	34,9	14.298.591.074	37,03	14.377.340.199	39,1	14.391.402.543	41,12	14.478.589.074	41,12	57.545.922.890	Kota Singkawang
		1.3.7.21	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik	Meter	87.289	96.202	14.298.591.074	105.172	14.377.340.199	113.612	14.391.402.543	122.715	14.478.589.074	122.715	57.545.922.890	



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11	12	13
		1.3.7.201.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Panjang Jalan Permukiman yg di bangun (M)	Meter		6.513	11.398.591.074	6.544	11.452.340.199	6.000	11.451.402.543	6.559	11.478.589.074	6.559	45.780.922.890	
		1.3.7.201.2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Panjang Jalan Permukiman yg di Pelihara (M)	Meter		2.400	2.400.000.000	2.425	2.425.000.000	2.440	2.440.000.000	2.000	2.000.000.000	2.000	9.265.000.000	
		1.3.7.201.3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	2	1.000.000.000	2	2.500.000.000	
		1.3.8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Daerah Kota Dalam Kondisi Baik	Persen	70,59	72,06	30.713.507.037	73,53	35.949.182.389	75	35.386.164.159	76,47	35.554.723.584	76,47	137.603.577.169	Kota Singkawang
		1.3.8.201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit	48	50	30.403.507.037	53	35.619.182.389	55	35.036.164.159	57	35.184.723.584	57	136.243.577.169	
				Jumlah rekomendasi yang diberikan	Rekomendasi	365	375	310.000.000	385	330.000.000	395	350.000.000	405	370.000.000	405	1.360.000.000	



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11	12	13
		1.3.8.201.1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Rekomendasi IMB, SLF, TABG dan Jumlah Aplikasi SIMBG	Rekomendasi	365	375	310.000.000	385	330.000.000	395	350.000.000	405	370.000.000	405	1.360.000.000	
		1.3.8.201.2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan gedung daerah yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	48	50	30.403.507.037	53	35.619.182.389	55	35.036.164.159	57	35.184.723.584	57	136.243.577.169	
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan				Ketaatan terhadap RTRW	Persen	34,23	96,24		97,05		98,19		99,2		99,2		
		1.3.9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan yang tertata	Persen	8,30	8,45	1.200.867.440	8,62	1.207.481.187	14,35	1.208.662.213	21,79	1.215.984.576	21,79	4.832.995.416	Kota Singkawang
		1.3.9.201	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang diselenggarakan	Kawasan		4		5		5		4		4		
					Dokumen		5	1.200.867.440	5	1.207.481.187	3	1.208.662.213	3	1.215.984.576	3	4.832.995.416	



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11	12	13
		1.3.9.201.1	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Dokumen		2	255.000.000	2	120.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	6	675.000.000	
		1.3.9.201.2	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah dokumen supervisi penataan/pemeliharaan bangunan	Dokumen		1	98.000.000	1	98.000.000	1	98.000.000	1	98.000.000	1	392.000.000	
		1.3.9.201.3	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah bangunan dan lokasi lingkungan yang ditata, jumlah peserta yang memahami perencanaan penataan bangunan	Kawasan		4	699.867.440	5	889.481.187	5	862.662.213	4	869.984.576	4	3.321.995.416	
		1.3.9.201.6	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring dan pengendalian	Dokumen		2	148.000.000	2	100.000.000	1	98.000.000	1	98.000.000	1	444.000.000	
		1.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Rencana Tata Ruang	Persen	14,29	28,57	2.124.163.732	57,14	2.135.862.510	85,71	2.137.951.577	100	2.150.903.795	100	8.548.881.614	Kota Singkawang



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	
		1.3.12.201	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah RDTR yang ditetapkan	Dokumen		5	1.374.163.732	5	1.385.862.510	5	1.387.961.577	3	2.500.000.000	3	6.647.987.819	
			Persentase RRTR Kota Singkawang	Orang		100	100		100		100		100		100		100
		1.0.12.201.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	-	-	-	900.000.000	
		1.3.12.201.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR	Jumlah dokumen	Dokumen		2	874.163.732	2	885.862.510	2	887.961.577	1	1.500.000.000	1	4.147.987.819	
		1.3.12.201.3	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen	Dokumen		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	500.000.000	2	800.000.000	
		1.3.12.201.4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi	Orang		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	100	800.000.000	
		1.3.12.202	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	Dokumen		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	800.000.000	



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11	12	13
		1.3.12.201.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	
		1.3.12.202.3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah dokumen	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	
		1.03.12.203	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	Dokumen		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	1.000.000.000	
					Aplikasi		1		1		1		1		1		
		1.3.12.203.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	600.000.000	
		1.3.12.203.2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sarana informasi tata ruang	Aplikasi		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	
		1.3.12.204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan penataan ruang	Kegiatan		2	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	1.200.000.000	



Tujuan	Sasaran RPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11	12	13
		1.3.12.204.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	350.000.000	
		1.3.12.204.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		1	250.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	550.000.000	
		1.3.12.204.4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		-		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	
TOTAL								138.403.825.035		144.205.520.312		148.882.292.603		153.647.235.052		585.138.873.003	



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

*TABEL T-C.28*

*Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD*

No	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
				K	K	K	K	
	6	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	48,71	49,42	49,75	50,06	50,36	50,36
2	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	93,50	93,80	94,08	94,20	94,57	94,57
3	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan dan non perpipaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	100	100	100	100%	100	100
4	Persentase jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	3,37	3,75	4,12	4,48	4,84	4,84
5	Persentase Perencanaan Sistem pengelolaan sampah regional	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Jalan mantap	Persen	52,35	53,02	54,12	55,30	56,41	56,41
7	Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	Persen	4,10	3,73	3,69	3,66	3,64	3,64



No	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
				K	K	K	K	
	6	8	9	10	11	12	13	14
8	Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	73,52	75,45	76,86	77,41	81,61	81,61
9	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	38,42	38,30	39,10	40,12	41,07	41,07
10	Persentase jasa konstruksi yang layak	Persen	84,44	50,00	55,26	60,53	69,74	69,74
11	Persentase Drainase yang terbangun	Persen	1,27	3,01	2,35	2,13	2,01	2,01
12	Persentase Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS Kab/Kota	Persen	8,33	8,50	8,75	9,02	9,29	9,29
13	Persentase jalan permukiman dalam kondisi baik	Persen	32,72	34,90	37,03	39,10	41,12	41,12
14	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Persen	70,59	72,06	73,53	75,00	76,47	76,47
15	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	34,23	96,24	97,05	98,19	99,20	99,20
16	Persentase rencana tata ruang	Persen	14,29	28,57	57,14	85,71	100	100
17	Persentase kawasan yang tertata	Persen	8,30	8,45	8,62	14,35	21,79	21,79



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sebagai pedoman untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2023-2026 dan sebagai sinkronisasi, sinergisitas dan penyelarasan pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Singkawang yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026 khususnya bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan melaksanakan Renstra ini sangat penting artinya dalam mewujudkan Pembangunan Pemerintah Kota Singkawang yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Renstra merupakan salah satu tolak ukur dalam pedoman bagi pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, melalui instrument berupa rumusan dan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci yang termuat di dalam tujuan, sasaran dan program pembangunan pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang setiap tahunnya.

Singkawang, Mei 2023

KEPALA DINAS,



**Ir. H. ASYIR A. BAKAR, MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631010 199003 1 018

